



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 56 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang menyebutkan Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib melaksanakan analisis Jabatan dan analisis beban kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan ASN;
- b. bahwa sehubungan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang akan dijadikan dasar untuk penyusunan peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilaksanakan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 perlu ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
10. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Nomenklatur Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan dibawah eselon terendah Perangkat Daerah.
16. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
17. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
18. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk menentukan kebutuhan pegawai bagi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dalam perencanaan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

BAB III PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA

Pasal 4

Setiap Aparatur Sipil Negara yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional diangkat dalam jabatan pelaksana.

BAB IV PETA JABATAN

Pasal 5

- (1) Peta Jabatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **27 Juni 2022**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **27 Juni 2022**

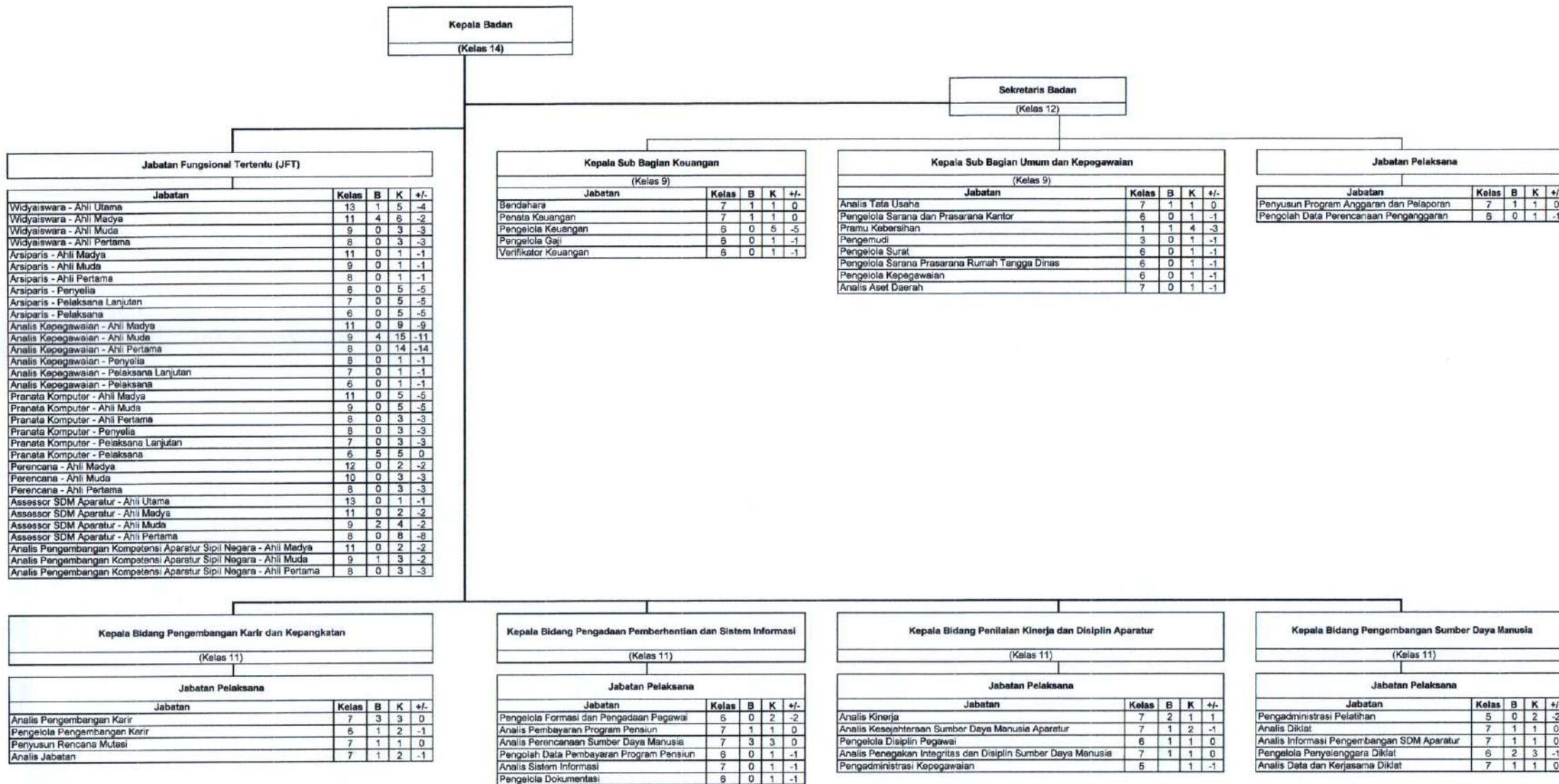
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **39**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

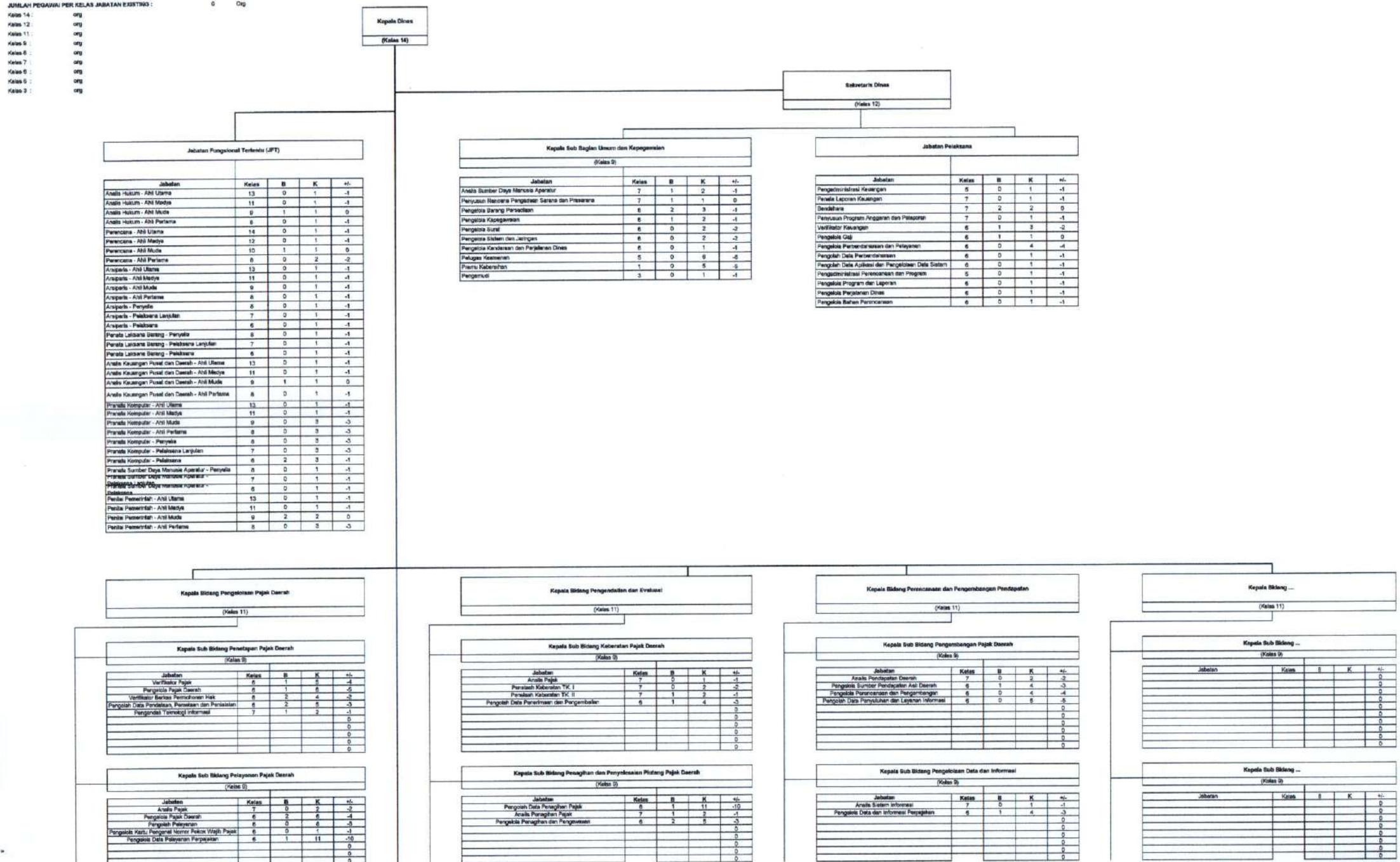
**PETA JABATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARAWANG**

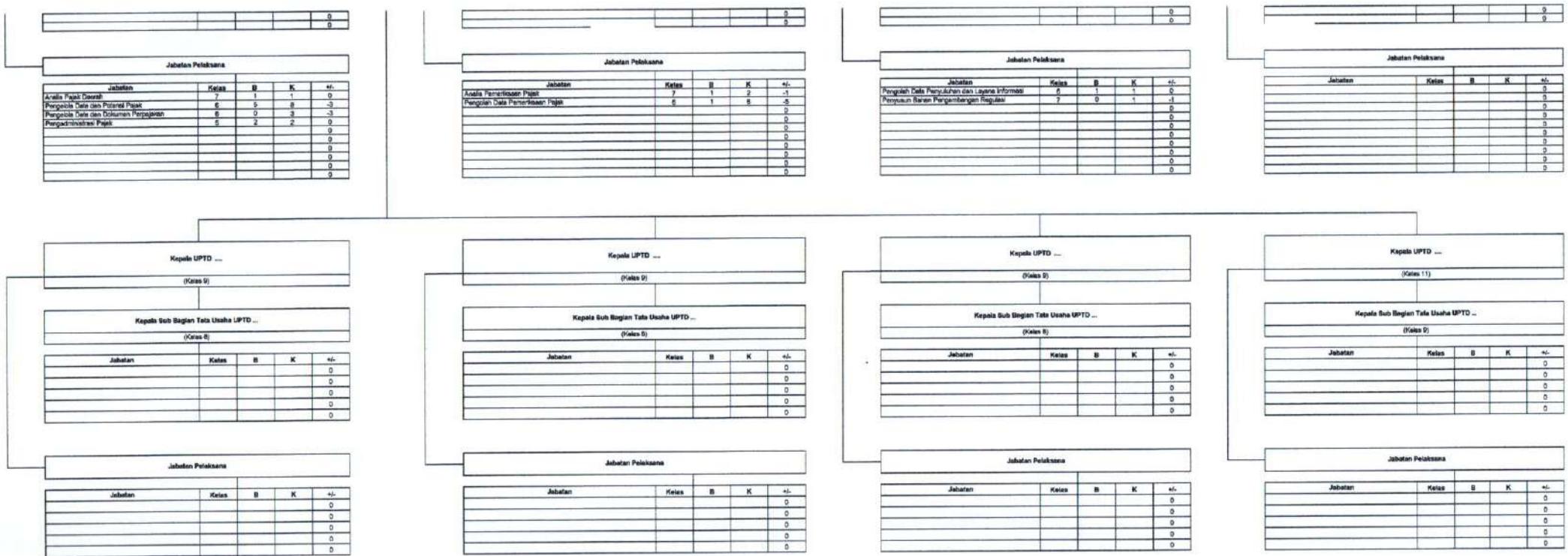


PETA JABATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

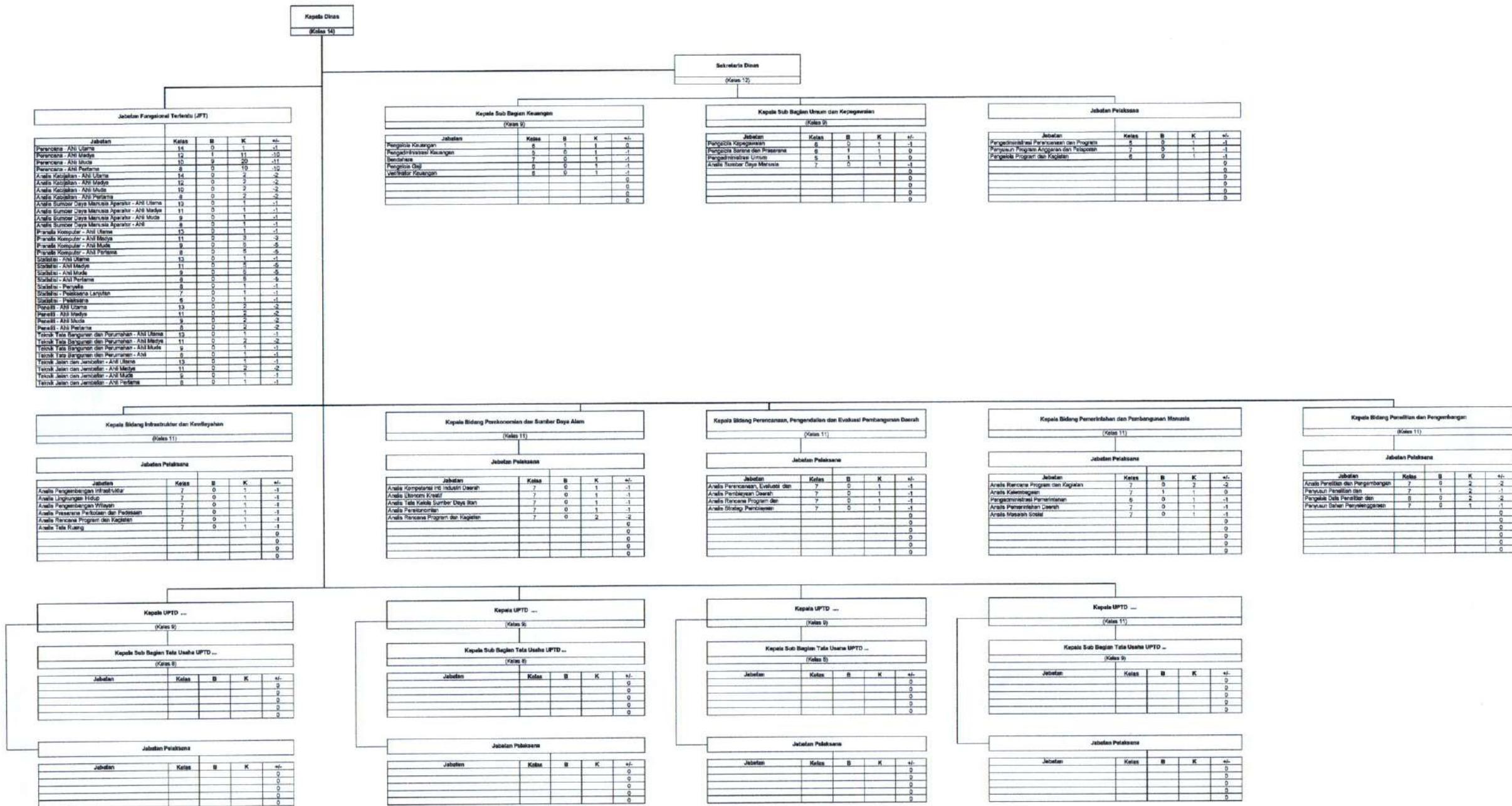
JUMLAH PEGAWAI PER KELAS JABATAN EXISTING :

6 Org

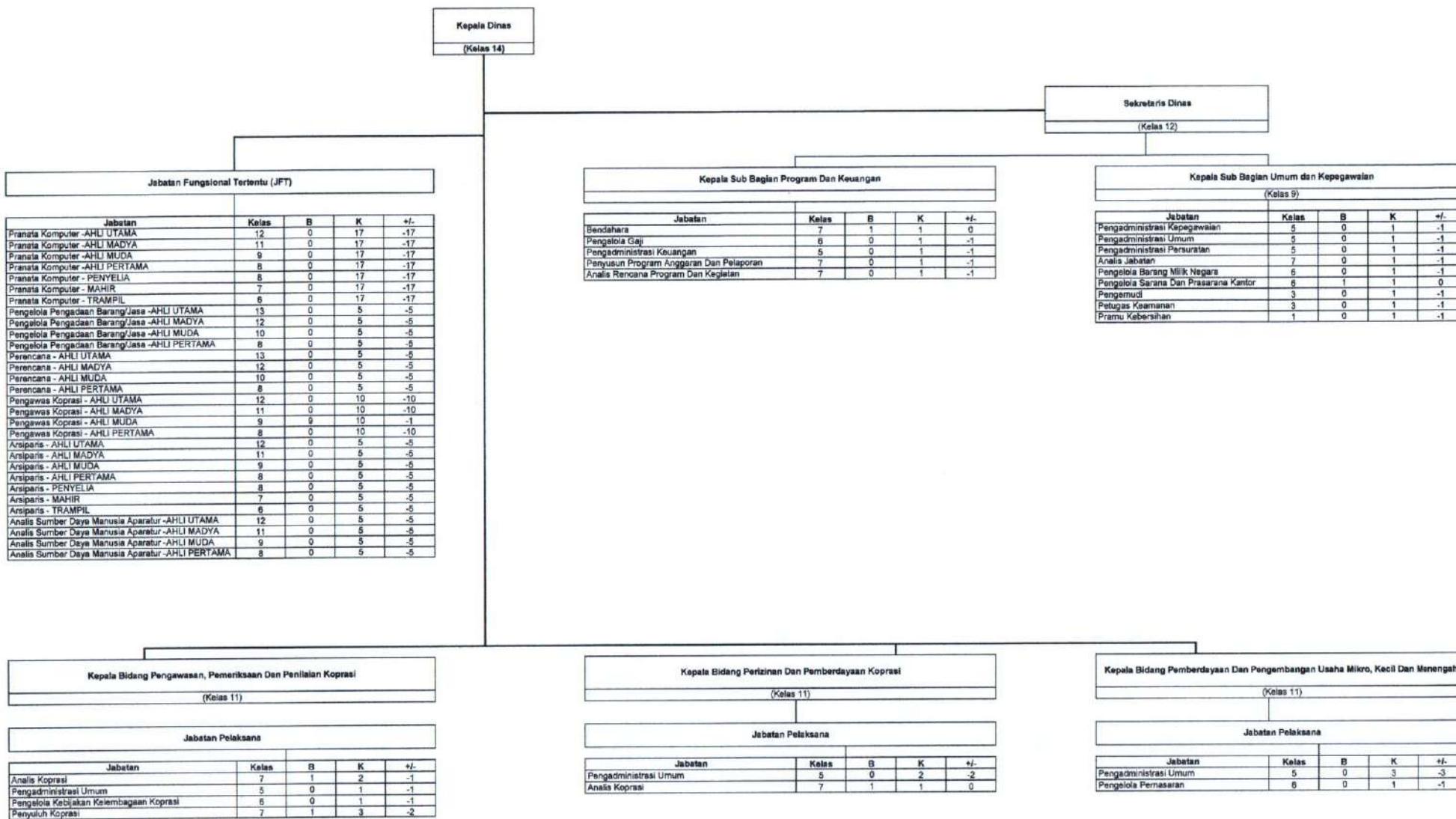




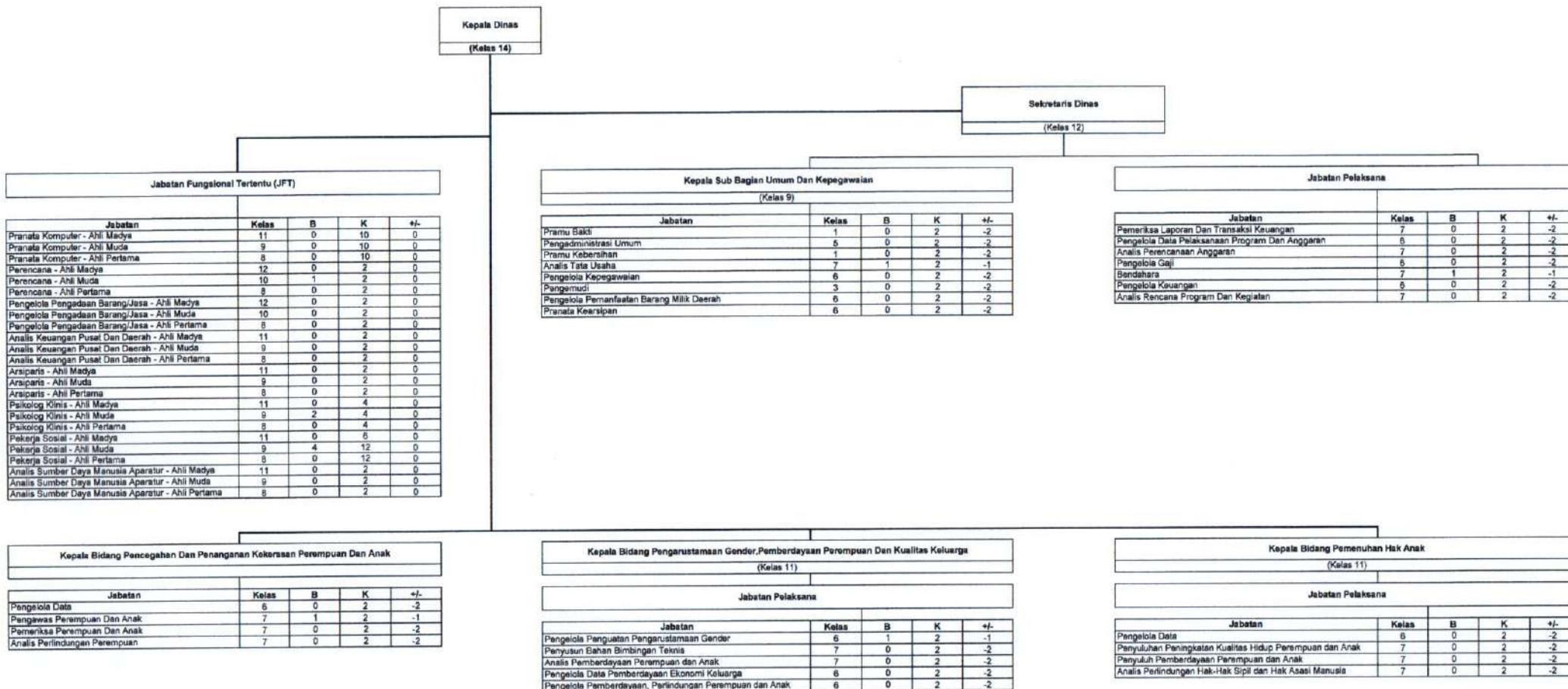
PETA JABATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG



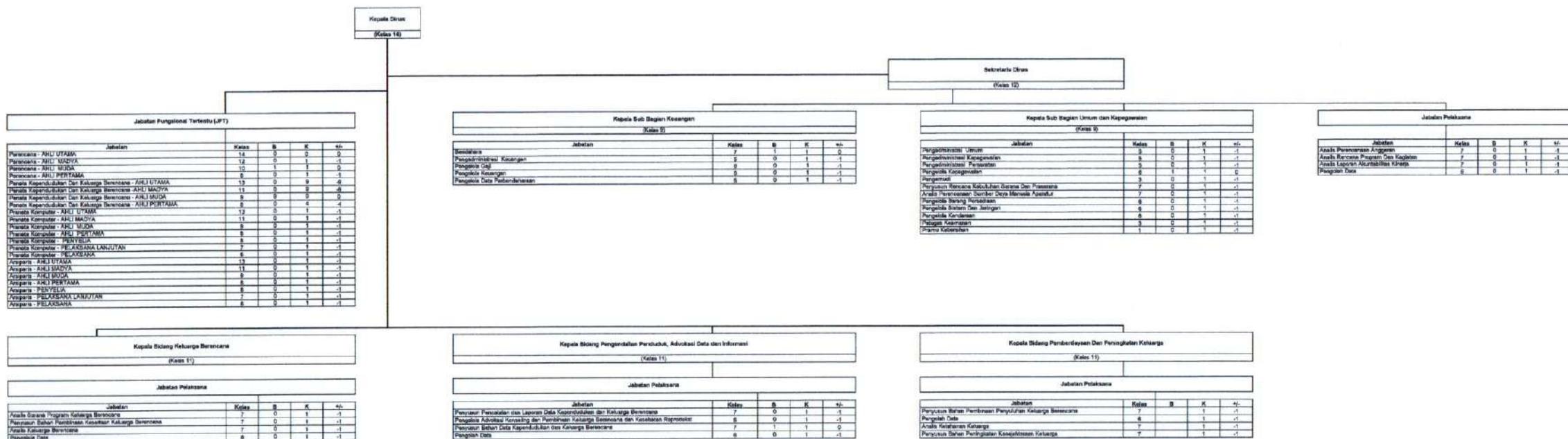
PETA JABATAN
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KARAWANG



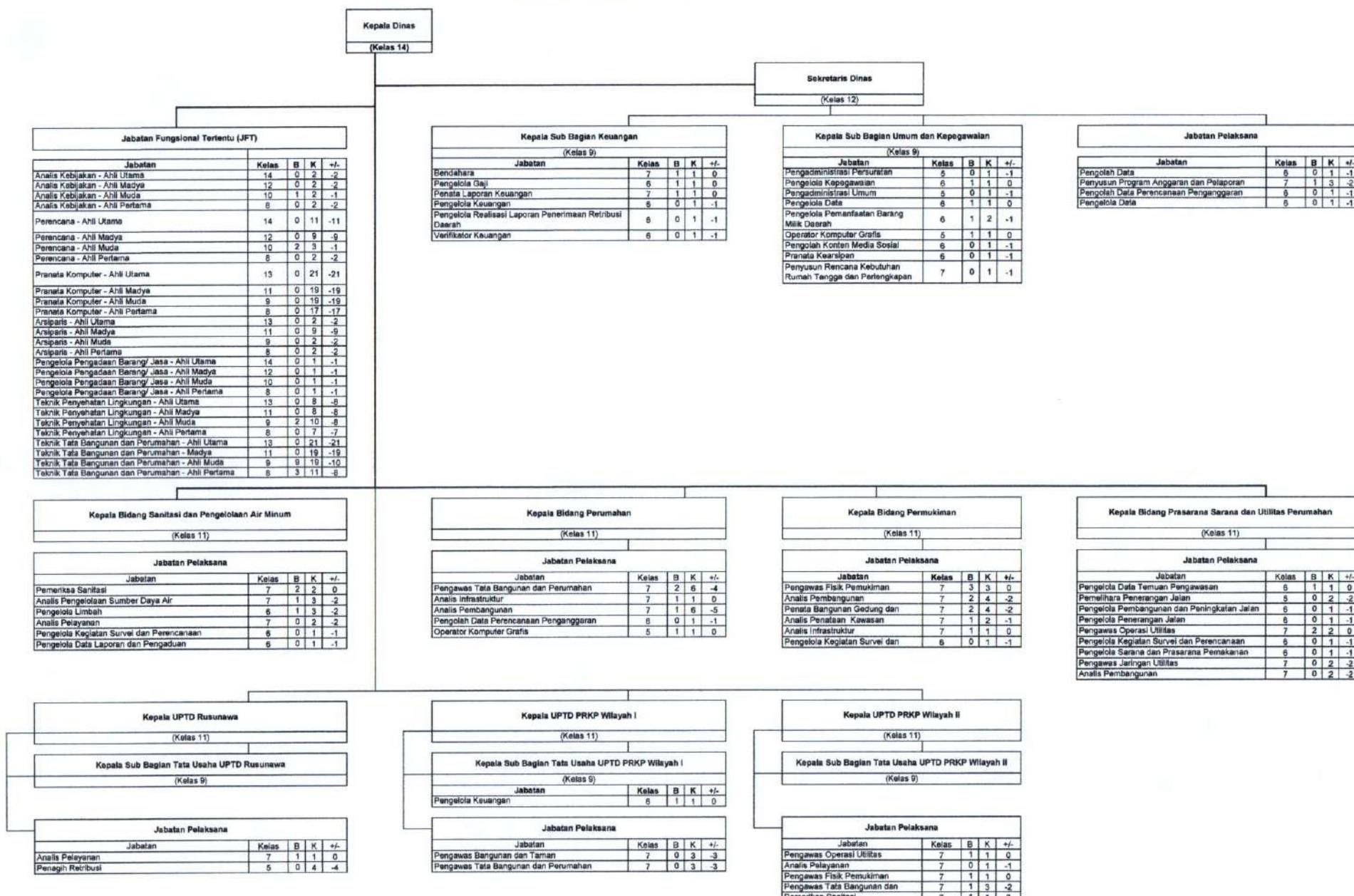
PETA JABATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARAWANG



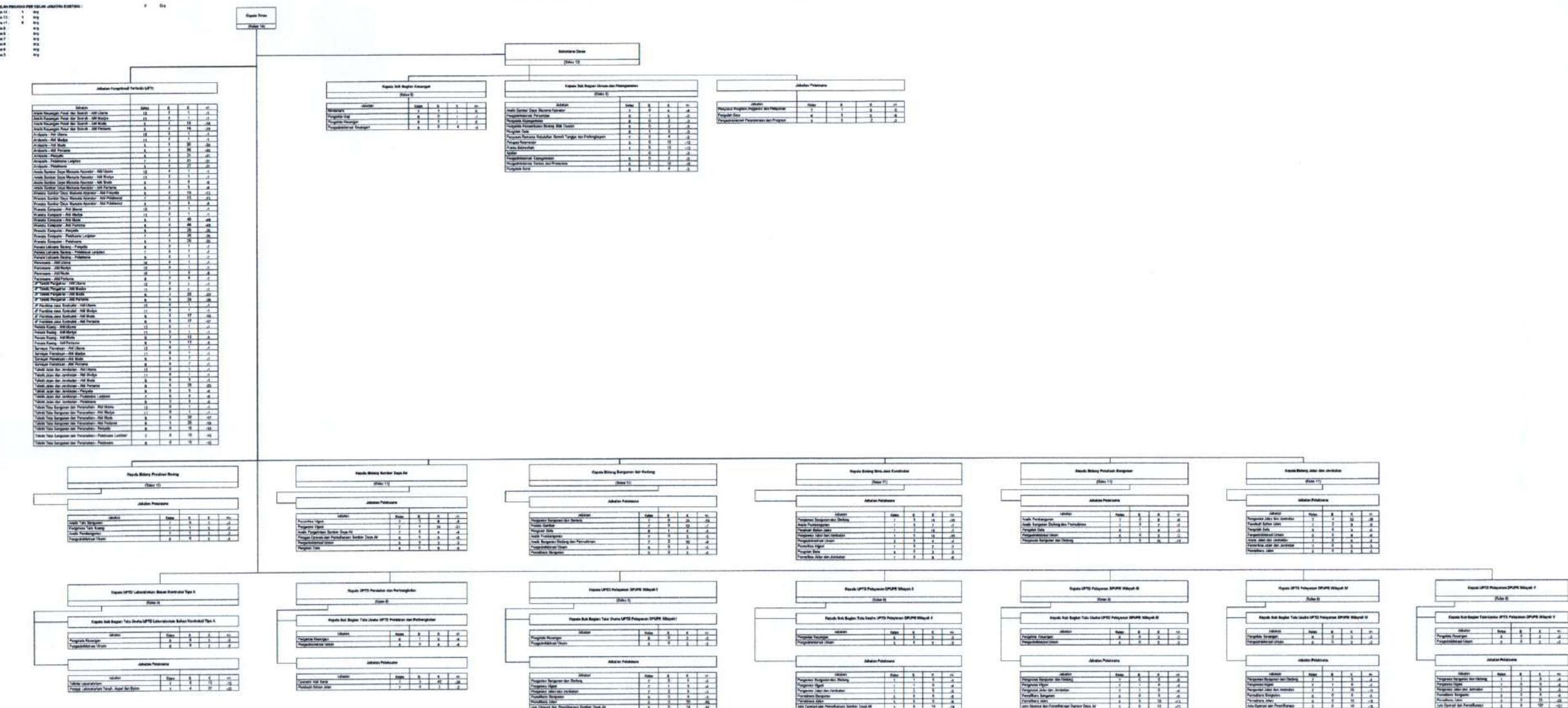
PETA JABATAN



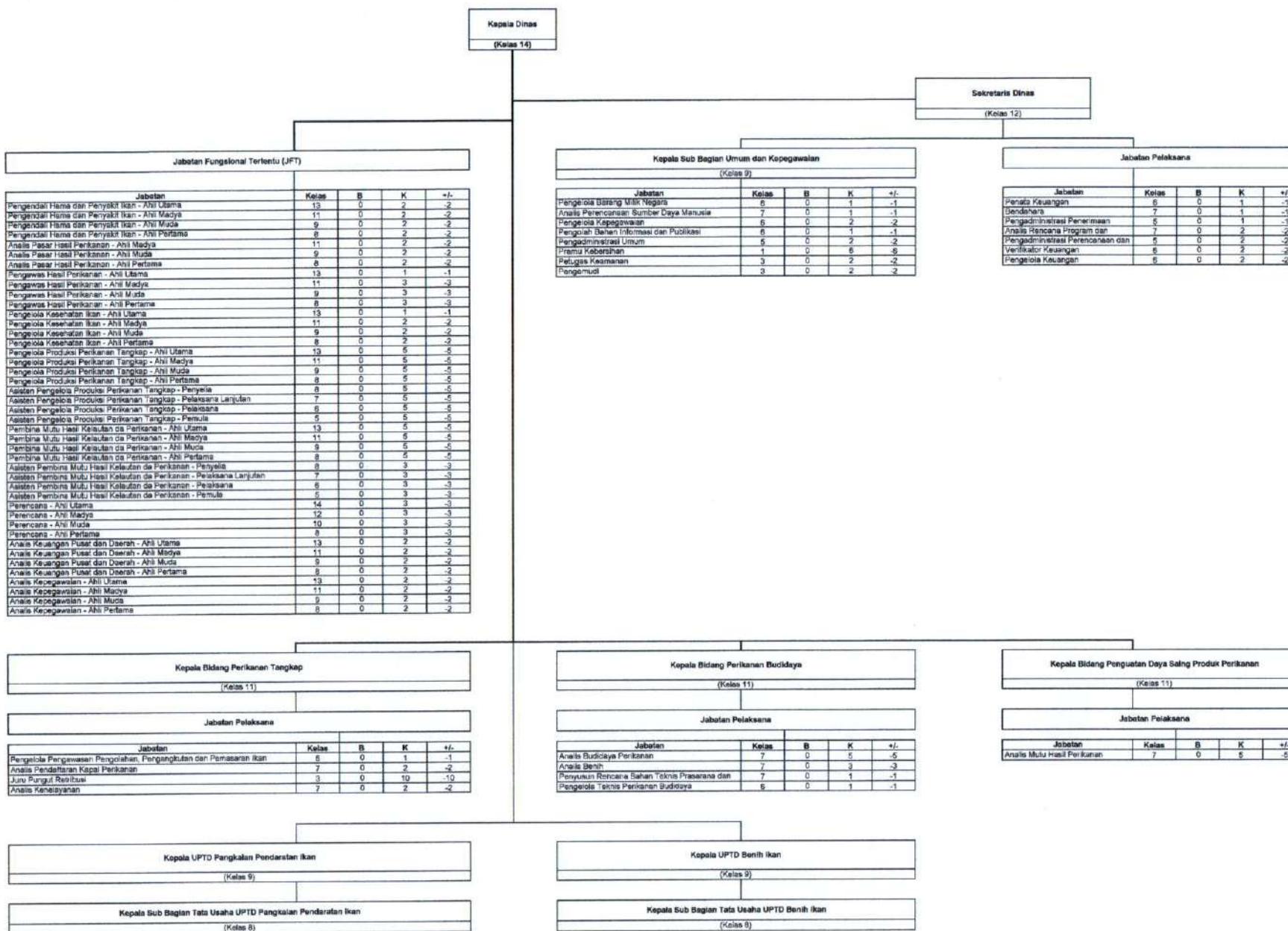
PETA JABATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KASAWAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KARAWANG



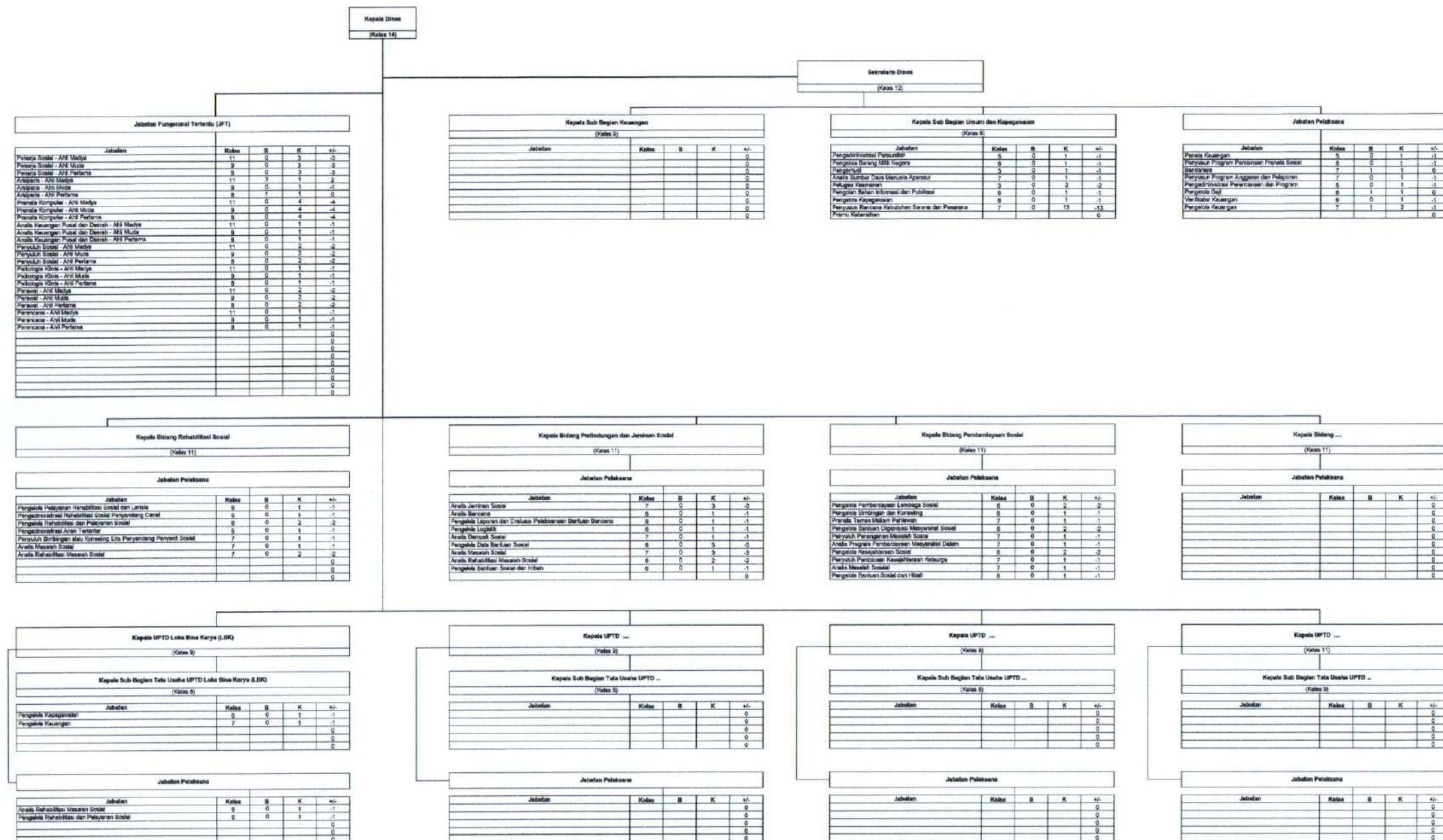
**PETA JABATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



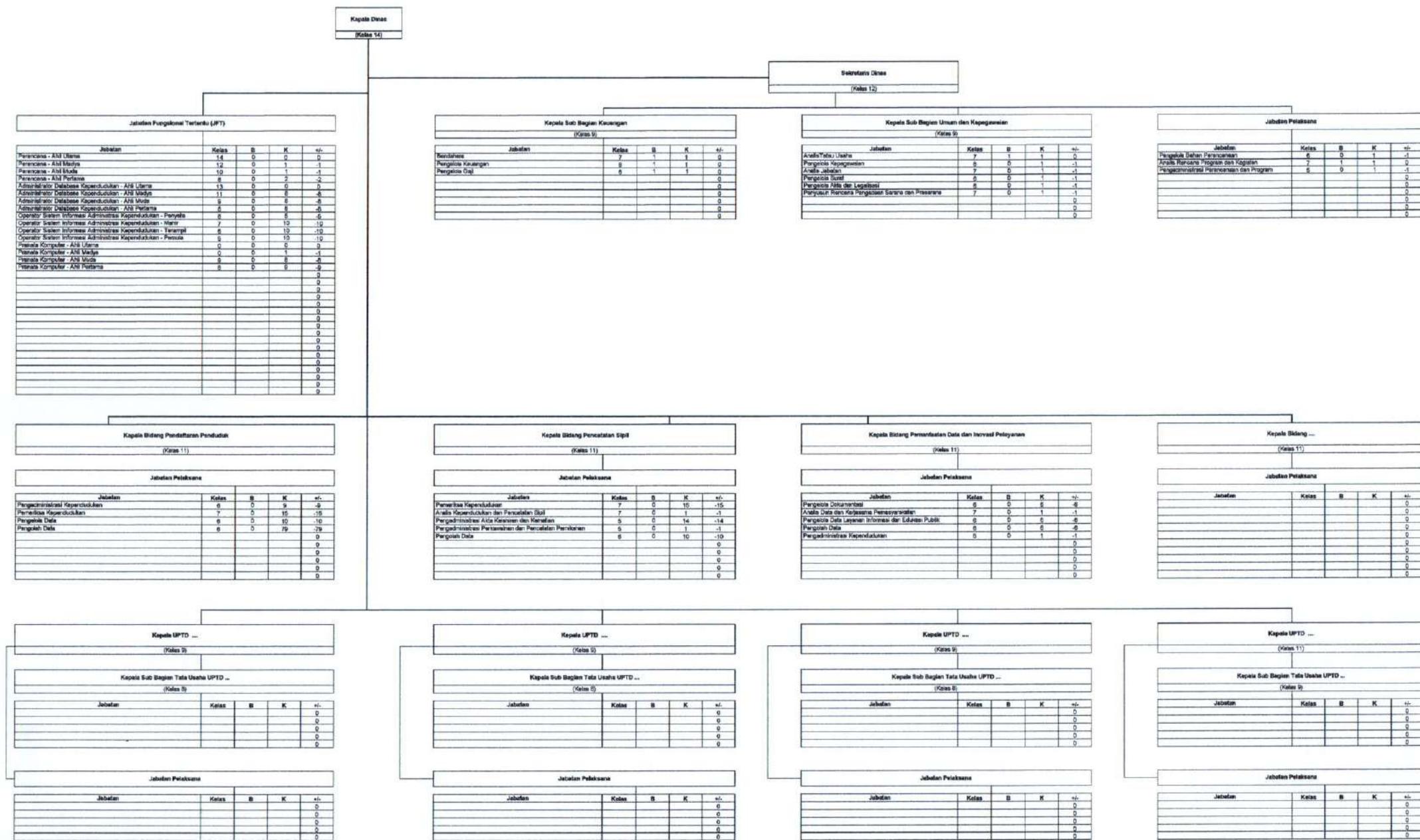
PETA JABATAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KARAWANG



**PETA JABATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN KARAWANG**



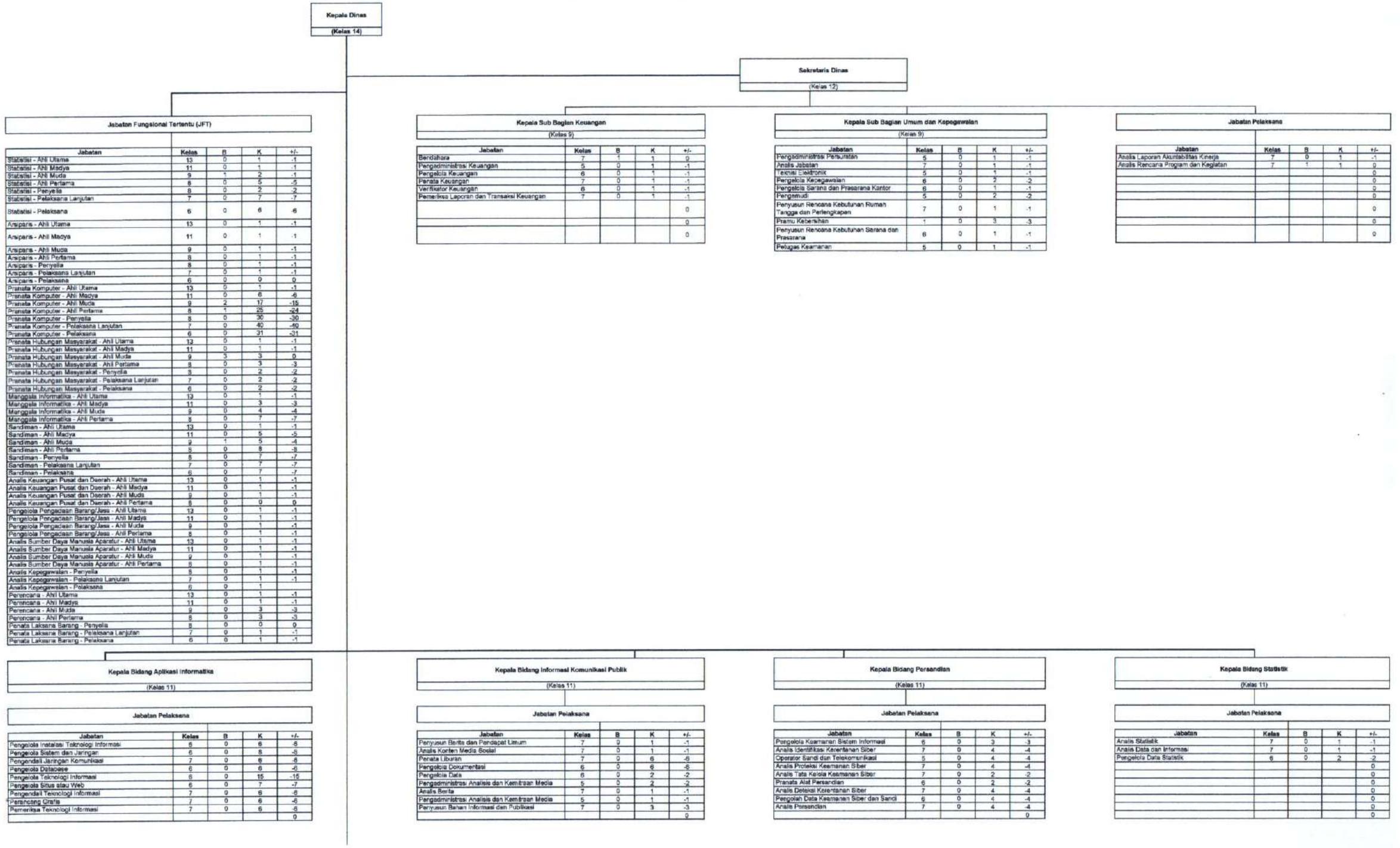
PETA JABATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARAWANG

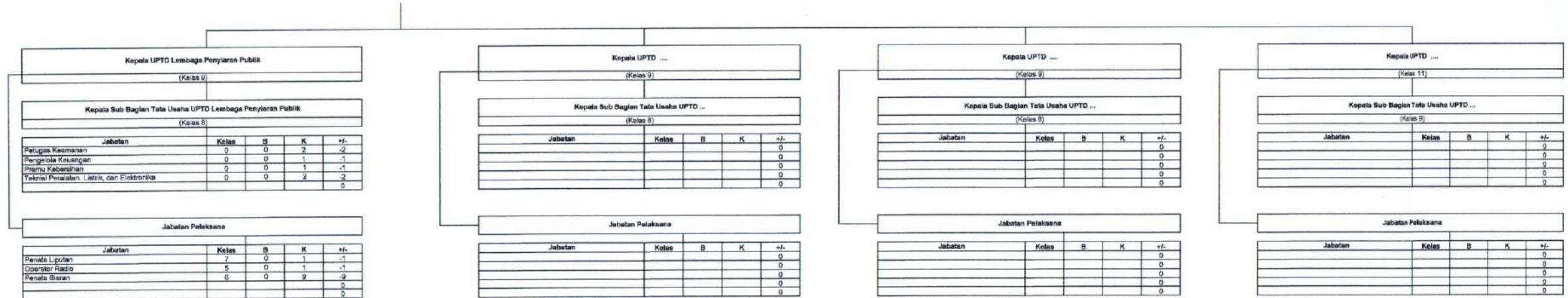


PETA JABATAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARAWANG

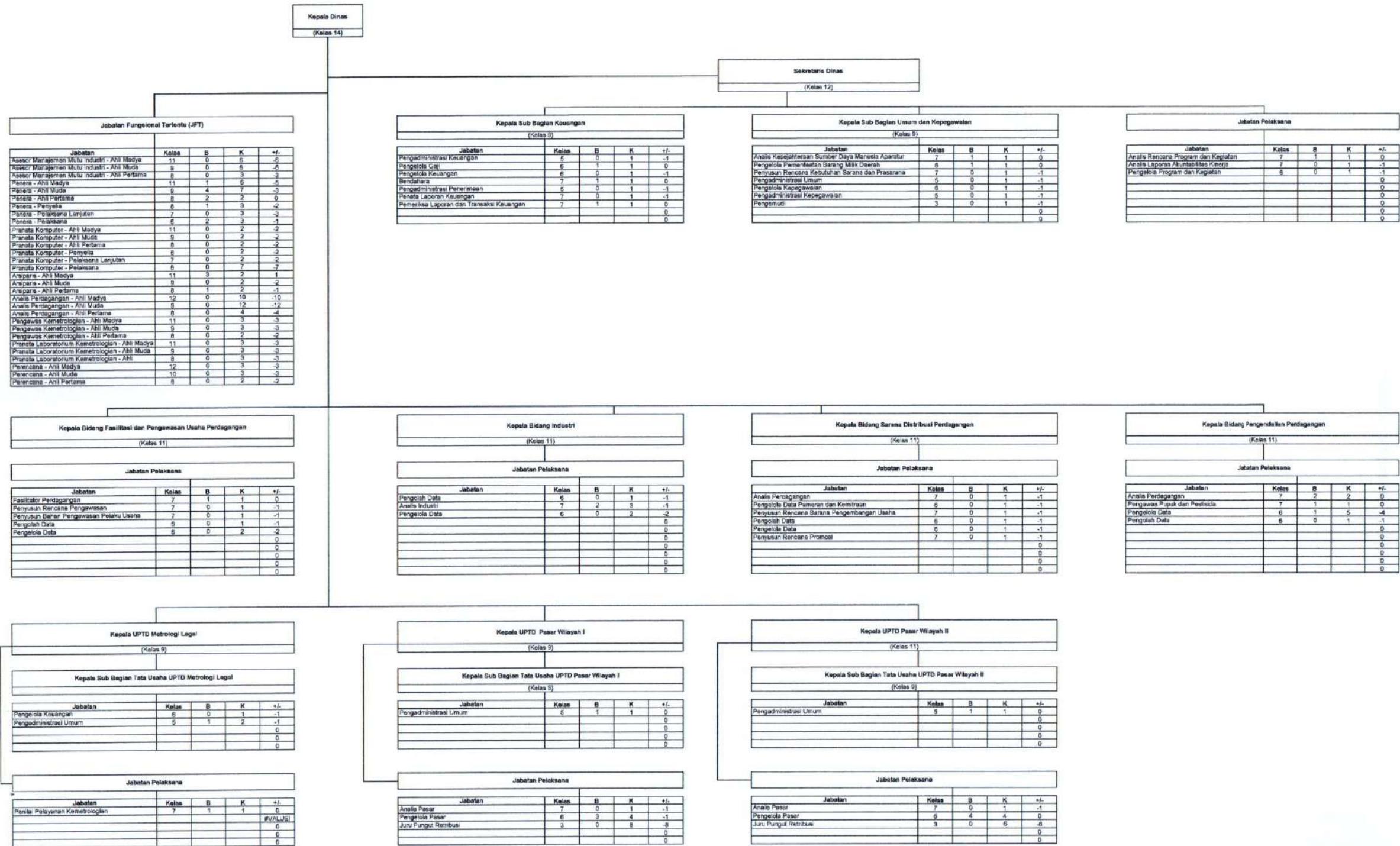


**PETA JABATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARAWANG**

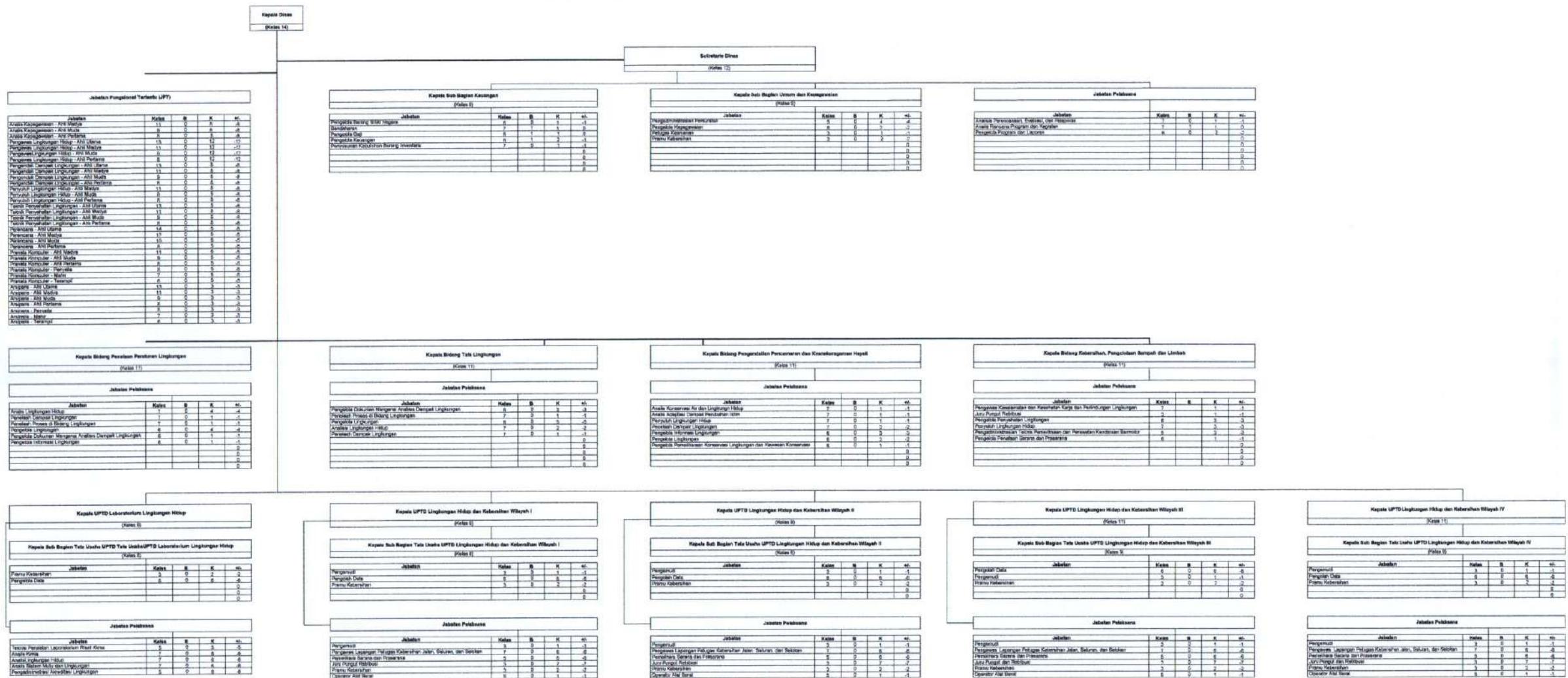




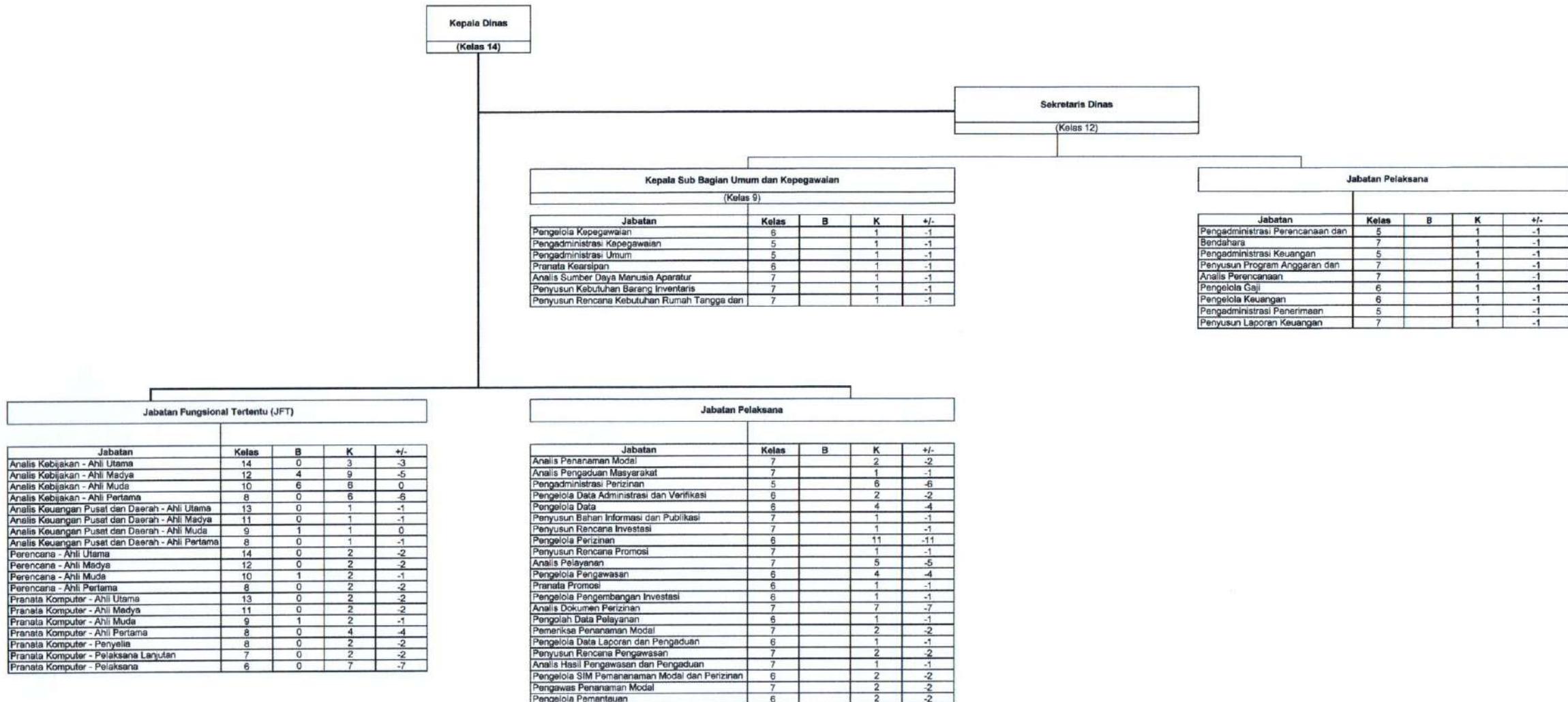
PETA JABATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KARAWANG



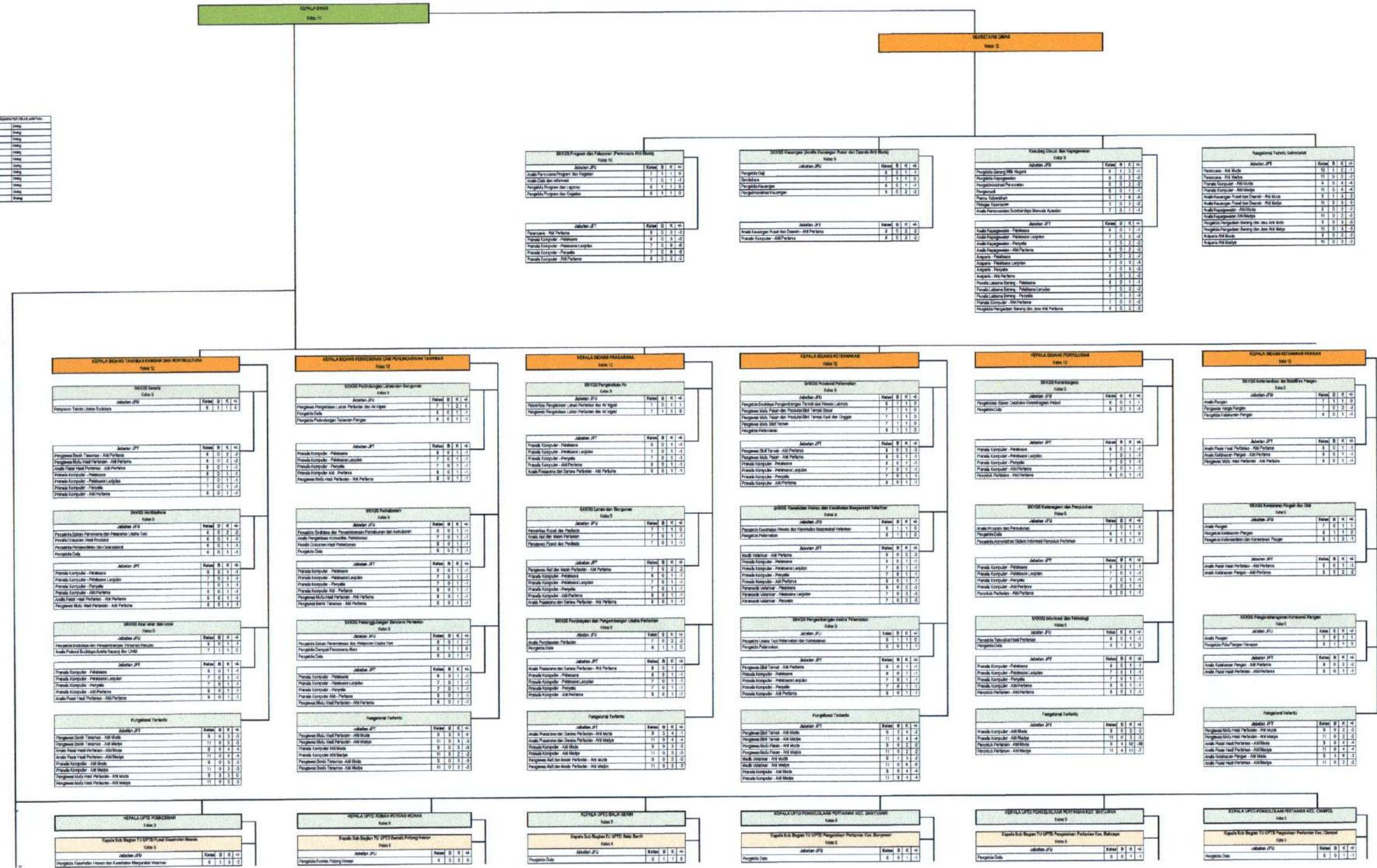
PETA JABATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARAWANG



PETA JABATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PETA JABATAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



Pneumon Cell	8	0	3	-1
Pneumon Capital	8	0	3	-1
Pneumon Letterman	8	0	3	-1
<i>Jabberwocky</i>				Values
Pronouns Jabberwocky	8	0	3	-1
Pronouns Jabberwocky -All	8	0	3	-1
Pronouns Jabberwocky	8	0	2	-2
Mad Tea-Party - All Poetries	8	1	1	0
Mad Tea-Party - All Multis	8	0	1	-1
Parasch - Poetries	8	1	1	0
Parasch - Poetries Lingua	7	0	2	-2
Parasch - Poemys	8	0	2	-2

Jumlah ST	Rata-rata	G	K	H
Banyak Komputer - Pekabasa	E	0	1	-1
Banyak Komputer - Pekabasa / rata-rata	F	0	2	2
Banyak Komputer - Pengel	G	0	2	2

Wage Level:	3	1	0
Term Length:	9	1	0
Jittery JET			
Impress Peleker - PeleksusPemula	0	2	4
Impress Peleker - Peleksus	0	1	3
Impress Peleker - PeleksusLanjar	7	0	2
Impress Peleker - Pendek	0	0	2
Impress Peleker - All Permits	8	1	5

Pengaruh Keberadaan	Z	I	S	D
Pengaruh Gaksesi Penerjemah	3	1	1	0
Jumlah JPT				
Pengaruh Perilaku - Perilaku Mental	5	1	1	0
Pengaruh Perilaku - Perilaku	5	0	1	1
Pengaruh Perilaku - Perilaku Linjir/Buruk	7	0	1	1
Pengaruh Perilaku - Perilaku	5	0	1	1
Pengaruh Perilaku - Perilaku	8	2	6	3

KOPALA UPTD PEMERINTAHAN PERTAMBANGAN DESEKTA				
Value 9				
Kepala Seksi Bagian TU UPTD Kegiatan Perkebunan Hutan, Change				
Jabatan JPT				
Kode	B	K	M	A
Pengelola Cada	0	1	1	1
Pengraji Penanaman	2	1	1	0
Praju Kehutanan	3	1	1	0
Jabatan JPT				
Pengawas Penanaman - Petani dan Petani	0	2	2	2
Pengawas Penanaman - Petani	0	0	2	2
Pengawas Penanaman - Petani dan Lurah	7	0	2	2
Pengawas Penanaman - Petani	6	0	2	2
Pengawas Penanaman - Asisten Petani	4	2	3	4

KEPALA UPUD PERENCANAAN PERTAMBANGAN					
Surat Tanda					
Kepala Unit Pengelolaan Perusahaan Energi dan Clamper					
Kepada Bapak/Ibu : Tuan/Puan Pengusaha/ Petugas Kew. Cilegon					
Jabatan/JFT	Nama	B	K	I	A+
Pengusaha Orang		0	0	1	0
Pengusaha Eksportir		0	1	0	0
Pengusaha Importir		0	1	0	0
Pengusaha Distributor		0	1	0	0
Pengusaha Penulis		0	2	0	1
Pengusaha Penulis - Pendek		1	0	2	0
Pengusaha Penulis - Panjang		0	0	1	1
Pengusaha Penulis - Jepitan		1	0	1	1
Pengusaha Penulis - Perayai		0	1	0	1
Pengusaha Penulis - All Peraya		0	2	0	1

ASPALA UPTD PENGELUARAN PERTAMINA KEC. CILARNA KULON				
Grafik 1				
Eksport ke Negara / LUPTD Pengeluaran Pertamina Kec. Cilarna Kulon				
Tahun 2010				
Jenisikan JPU	Rabat	B	I	A+
Pengeluaran Debit	8	6	1	4
Pengeluaran Intermediate	2	1	0	0
Pengeluaran Kapital	3	1	1	0
Jumlah JPU	13	8	2	4
Eksport ke Negara / LUPTD Pengeluaran Pertamina Kec. Cilarna Kulon				
Jenisikan JPU	Rabat	B	I	A+
Pembelian Pertama - Petrolium Pertama	5	1	1	1
Pembelian Pertama - Petroleaks	6	1	1	1
Pembelian Pertama - Petroliax Lestari	7	0	1	1
Pembelian Pertama - Petroliax	6	1	1	1
Pembelian Pertama - Petroliax	6	4	12	4

KEPRI WPI D PERILAKUAN PEMERINTAH RES. ELABATWA MERAH				
Kata-kata				
Kategori Sub Region EU (SPTC): Pengembangan Produk Kaca, Ceramik, Weweh				
Kata-kata				
Jumlah JFT	Barisan	G	R	=
sejuga Gara	0	0	1	1
sejuga Konservasi	0	0	1	1
sejuga, konservasi	0	1	1	0
Jumlah JFT	Barisan	G	R	=
sejuga Pembenaran - Pembenaran/Pemilah	3	0	2	2
sejuga Pembenaran - Pemilah	0	0	2	2
sejuga Pembenaran - Pemilah	0	0	2	2
sejuga Pembenaran - Pemilah	0	0	2	2
sejuga Pembenaran - Atas Pembenaran	0	0	2	2
sejuga Pembenaran - Atas Pembenaran	0	2	10	4

KUPA UPTC FORNEGLAHAN PENCANAAN KEC. JAYATIRTA				
Kode B				
Kepala Sub Bagian TU UPTC Pengembangan Perilaku Kesejahteraan				
Kode B				
Jabatan-JV	Kode	B	E	M
Hormongan Desa	6	0	1	1
Pedagog Kesejahteraan	2	1	1	0
Perwak Fakultas	3	1	1	0
Jabatan-JPT				
Pengembangan Perilaku Perorangan	3	0	1	1
Pengembangan Perilaku	6	0	1	1
Pengembangan Perilaku Kelompok	7	1	1	0
Pengembangan Perilaku Persekolah	8	0	3	2
Pengembangan Perilaku All Perilaku	8	2	7	1

KEPALA UPACARA PENDIDIKAN DAN KARYA KECAMATAN KARAWANG BARAT					
Edisi 3					
Kepala Sub Bagian ITU (UTS) Perwakilan Polda Banten Kec. Karawang Barat					
Jabatan /FT					
Ketua					
Pengawas Dasar	3	0	1	-1	-1
Pengajar Kewajiban	3	1	1	0	-1
Prajurit Keterlibatan	3	1	1	0	-1
Jabatan /FT					
Ketua					
Pengajar Pendirian - Pendidikan Prinsip	5	0	1	-1	-1
Pengajar Pendidikan - Polda	6	0	1	-1	-1
Pengajar Pendidikan - Polda	7	0	1	-1	-1
Pengajar Pendidikan - Pengabdian	8	0	1	-1	-1
Pengajar Pendidikan - All Pengabdian	5	2	6	-4	-1

KEPALA UPD PENGELLAHAN PERTANAHAN KEC. KARANGANDE TIMUR				
Kode S				
Format Data Bagian TU (UPD) Pengelahan Pertanahan Kec. Karangande Timur				
Nomer S				
Jenisifer (PU)	Kode	B	x	-4
Pengaruh Cetak	1	0	1	1
Pengaruh Kelembaban	2	1	1	0
Pengaruh Ketinggian	3	1	1	0
Pengaruh Radiasi	4	0	1	1
 <i>Jumlah JT</i>				
Pengaruh Perbatasan - Perbatasan Pekaruan	5	0	2	2
Pengaruh Perbatasan - Hutan	6	1	2	-1
Pengaruh Perbatasan - Perbatasan Laut	7	0	2	-2
Pengaruh Perbatasan - Pantai	8	0	2	-2
Pengaruh Perbatasan - Air Perbatasan	9	1	3	-2

KEPALA UPTD FORMULIRAN PERTAMA IND. KLAIR				
Kode: II				
Kunci Sab. Bagian TB UPTD Pengelolaan Persefus. Kec. Klaten				
Kode: I				
JABATAN JFT				
Anggota Duta		B	K	G
		A	B	C
Anggota Komisi				
		1	1	0
Anggota Komite				
		3	1	0
Anggota Komunitas				
		3	1	0
JABATAN JFT				
Anggota Pemerintah - Pemerintah Provinsi		B	K	G
		5	2	2
Anggota Pemerintah - Pemerintah Kabupaten				
		8	2	1
Anggota Pemerintah - Pemerintah Lingkungan				
		7	2	2
Anggota Pemerintah - Pemkab				
		8	2	2
Anggota Pemerintah - Asosiasi				
		8	3	5

KAPASITAS UPGRADING KAPASITAS ANGKA KEC. KOTABARU				
Nilai 0				
Kapasitas Sub Region TU (UPT-Pengelolaan Pendidikan Kap. Kotabaru)				
Nilai 0				
Jumlah JPU				
Anggota Diklat	5	0	0	0
Total Kehadiran	3	1	0	0
Anggota Kehadiran	3	1	0	0
Jumlah JPT				
Anggota Pemohon - Pendidikan Persemaian	1	1	2	-2
Anggota Pemohon - Pendidikan	0	0	1	-1
Anggota Pemohon - Pendidikan Lanjut	7	0	1	-1
Anggota Pemohon - Persemaian	0	0	1	-1
Anggota Pemohon - All Persemaian	6	2	3	-1

KEPALA UPTD PENGOLAHAN RAKYAT KEC. KEBARULU				
Lain-lain				
Kegiatan Sub Bagian TU/UPTD Pengolahan Rakyat Kec. Kebarulu				
Golongan C				
Jabatan STJ	Rahmat	B	M	N
Pengajar Dikti	0	0	0	0
Pengajar Asesmen	0	1	1	0
Pengaruh Dikti	0	1	1	0
 Jabatan STJ				
Pengajar Pertama - Pengajar Pertama	0	1	0	2
Pengajar Pertama - Pengajar	0	0	1	1
Pengajar Pertama - Pengajar Legalis	0	1	1	0
Pengajar Pertama - Pengajar	0	0	1	1
Pengajar Pertama - Pengajar	0	1	1	0

KEPALA UPTD PENCERITAN PERPUSTAKAAN IKSC LEMAHABANG				
Tabel 9				
Ketulusan Siswa UPTD Perpuskinan Putra Kec. Lemahabang				
Kode 5				
Jabatan JPU	Kewajib	B	K	M
Pengelola Data	5	0	1	-1
Pelajar Esasname	2	1	1	0
Pemros. Kebutuhan	2	1	1	0
 Jabatan JPT				
Himpunan Perilaku - Relasiensi Personal	5	0	2	-2
Himpunan Perilaku - Relasiensi	6	1	1	0
Himpunan Perilaku - Relasiensi Lingkungan	7	0	1	-4
Himpunan Perilaku - Perayaan	8	0	1	1
Himpunan Perilaku - Rasa Perasaan	9	2	7	-5

KEPERLUAN PENGELUARAN PERTAHANAN NEGARA BAJUH AIR				
Catatan 2				
Kepada Seluruh Tujuan UPT Pengeluaran Pertahanan Negara Bajuh Air				
Catatan 3				
Abjad: JPU				
Penganggaran	0	0	1	-1
Pelabur Edukasi	3	1	1	0
Pembiayaan Universiti	3	1	1	0
Abjad: JFT				
Penganggaran Pertahanan Persekutuan	5	0	2	-2
Penganggaran Pertahanan Persekutuan	8	2	2	-1
Penganggaran Pertahanan Persekutuan Lain-lain	7	0	2	-2
Penganggaran Pertahanan All-Power	8	0	2	-2
Penganggaran Pertahanan All-Power	5	2	2	-4

KEPALA UPTD PENGELULUAN PERTAMA KEC. PANDAKALAN					
Hasil E					
Kepala Sub Dugan Tu UPTD Pengeluluhan Pertama Kec. Pengeluluhan					
Hasil E					
Jumlah JRI					
Pengalaman Dikti	4	0	1	1	
Pengalaman Administrasi	3	1	1	0	
Pengalaman Keharusan	3	1	1	0	
Jumlah JRI					
Pengalaman Performer - Relasiasi Personal	5	2	2	-2	
Pengalaman Performer - Relasiase	7	0	0	2	
Pengalaman Performer - Relasiase Legalitas	7	0	0	2	
Pengalaman Performer - Projek	8	0	0	2	
Pengalaman Performer - All Performer	8	1	2	-4	

NETRAL UPTD/PENGOLAHAN PEMERINTAH KEC. PAROGIWA					
Kode 9					
Keperluan Bantuan TU UPTD Pengolahan Perparan Kec. Parogawa					
Kode 5					
Jabatan JT1					
Anggota Diklat	1	0	1	1	
Anggota Komisi	3	1	1	1	
Anggota Galeritis	2	1	1	0	
Jabatan JT2					
Anggota Pemerintah - Pihaknya Pemerintah	5	0	1	1	
Anggota Pemerintah - Pihaknya	7	0	1	0	
Anggota Pemerintah - Pihaknya dan orang	2	0	1	1	
Anggota Pemerintah - Pihaknya	8	1	0	1	
Anggota Pemerintah - All Pihaknya	8	1	0	1	

KEPALA UPTD PENGOLAHAN DAN PENGETAHUAN				
JABATAN				
Kepala Unit, Bagian, UPTD Pengolahan dan Pengetahuan	Pengetahuan	Kelembagaan	Keberlanjutan	Keberdayaan
Pengembangan	6	3	1	4
Pelaksanaan	3	1	1	0
Pemantauan	3	1	1	0
Jumlah JFT:				
Pengembangan Perilaku - Pendidikan Pernikahan	5	6	1	4
Pengembangan Perilaku - Pendidikan Kesehatan	8	1	1	0
Pengembangan Perilaku - Pendidikan Lingkungan	7	1	1	2
Pengembangan Perilaku - Pendidikan	8	0	1	1
Pengembangan Perilaku - Alat Pertanian	8	0	2	0

KEPALA UPPT PENGOLAHAN PERTANIAN KEC. PAKAMBARA				
Kode S				
Himpunan Sub-Bagian TU UPPT: Pengolahan Pertanian Pk. Rendahnya				
Kode Z				
Jabatan JP2		Rates	S	K / A
Pengolahan Cabe		6	1	-1
Pengolahan Kacang		6	1	-1
Pengolahan Kacang		2	1	-1
Jabatan AP2		Rates	S	K / A
Pengolahan Petani - Petani Pemula		5	1	-1
Pengolahan Petani - Petani		6	0	1
Pengolahan Petani - Petani Lajur		7	0	1
Pengolahan Petani - Petani		6	0	1
Pengolahan Petani - Ahli Muda		6	1	-1

KELAKUAN PADA TINGKAT KONSEP DAN PENGETAHUAN SISWA				
Kelas 3				
Kelebihan Siswa Dalam Belajar TUGUH PENGARUH PEMBERIAN KONSEP DAN PENGETAHUAN				
Kategori				
Jumlah JPU	Kode	S	K	A+
Pengaruh Cukup		5	1	4
Pengaruh Rendah		3	1	0
Pengaruh Ketidaksamaan		3	1	0
Jumlah JPU				
Pembelajaran-Pembelajaran		5	1	1
Pembelajaran-Pendidikan		5	0	1
Pembelajaran-Pendidikan-Lajang		5	0	1
Pendidikan-Pendidikan		5	0	1
Pendidikan-Pendidikan		5	4	0

KELAHIA (PTD) PRINCIPAL CLASS PREDMATH INC.		TOTAL JUMLAH	
Kode B			
Kepada Bapak (Bapak Tua) Untuk Penghargaan Perbaikan Kita, Terbagaimana			
Ajibatu (PT)		Kategori	B X 4
Pengaruh Kelembutan	8	1	1
Pengaruh Kelembutan	3	1	1
Pengaruh Kelembutan	3	1	1
Opayun Perbaikan - Halokaha Perbaikan	5	2	4
Perbaikan Perbaikan	9	4	4
Perbaikan Perbaikan	7	4	4
Perbaikan Perbaikan	8	4	4
Perbaikan Perbaikan	8	1	4
Perbaikan Perbaikan	8	1	4

KEPALA UNIT FISIK DAN KEAMANAN HSC, TILAKADU Untuk : W				
Rekod Sub-Dekan UU UPJC - Pengambilan Perolehan Hsc, Terengganu				
Kata Kunci :				
Jabatan/JFT	Matric	M	H	A+
Anggota Dekan	5	0	1	1
Anggota Konsyen	5	1	1	0
PPRS/Kepala Unit	3	1	1	0
Jabatan/JFT	Matric	B	C	A+
Anggota Konsyen - Relawan Perancis	3	2	4	2
Anggota Konsyen - Relawan Inggeris	3	2	4	2
Anggota Pendekar - Relawan Lelaki	1	0	3	2
Anggota Pendekar - Perempuan	8	0	2	2
Anggota Pendekar - JPS Perancis	8	1	9	4

KAPASITAS POKOK PENGETAHUAN KEC. TELUK JAMBI DATAR				
Kelas 3				
Kapasitas Siswa Kelas 3 SMP N Pengembangan Perkampungan Batu				
Jabatan : ST				
Kelas : XI				
Kapasitas Cerdas				
1	5	1	1	3
Ayah Kusumani	3	1	1	0
Wiwu Kusumani	2	1	1	0
Jabatan : ST				
Kelas : XI				
Kapasitas Relasi - Relasi Dalam				
1	5	1	0	6
Kapasitas Relasi - Relasi Dengan Lingkungan	2	0	1	3
Kapasitas Relasi - Relasi Dengan Lingkungan	7	0	1	4
Kapasitas Relasi - Perihal Diri	8	0	1	4
Kapasitas Relasi - Perihal Diri	8	4	7	25

REPUBLIK INDONESIA PERGURUAN TINGGI				
PERPUSTAKAAN				
JALUR PENDIDIKAN				
Kode				
Jalur PTN	Kode	B	C	D
Perguruan Tinggi Negeri		0	1	1
Perguruan Tinggi Swasta		2	1	0
Pendidikan Ketenagakerjaan		2	1	0
Jalur STT	Kode	B	C	D
Pendidikan Profesi Kesehatan		0	1	1
Pendidikan Profesi Pertanian		1	0	1
Pendidikan Profesi Pertambangan dan Logistik		2	0	1
Pendidikan Profesi Perhotelan		2	0	1
Pendidikan Profesi Keterampilan		2	1	0

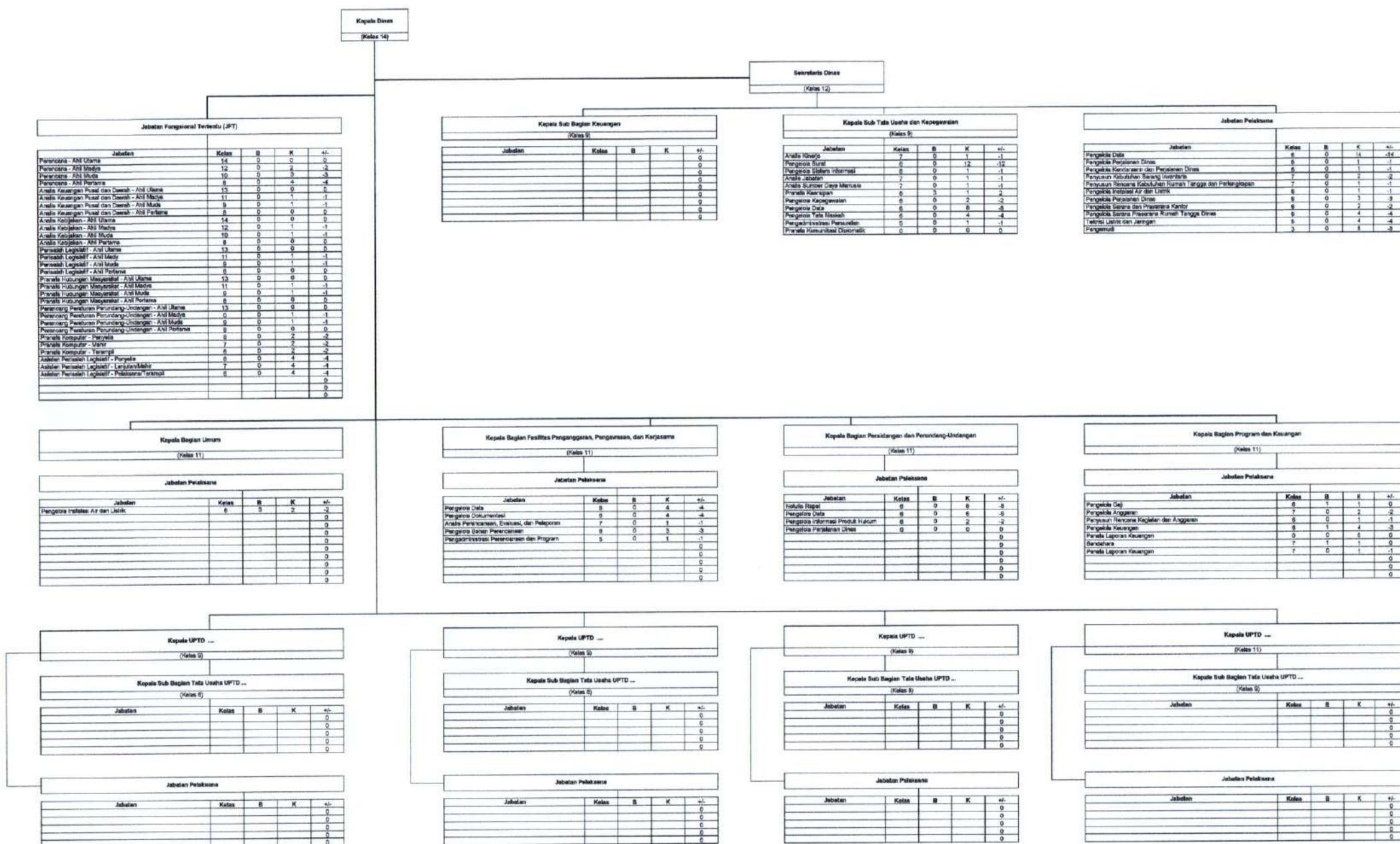
KEPALA UPK / PENGOLAHAN PERTANAKAN, TEMPUWAH Kode 9				
Kepala Sub Dinas TU UPK dan Pengelola Pertanian Kec. Tampuan				
Formulir				
Jabatan JPU				
	Nama	B	K	A
Pengelola Cukai		6	1	0
Pengelola Keamanan		3	1	0
Pengelola Kehutanan		3	1	0

Abstrak JFT				
Kategori				
	Nama	B	K	A
Pengelola Pertanian - Petani dan Petrusia		5	2	1
Pengelola Pertanian - Petrusia		6	0	3
Pengelola Pertanian - Petrusia		7	0	2
Pengelola Pertanian - Petrusia		9	0	2
Pengelola Pertanian - Alik Partians		8	3	4

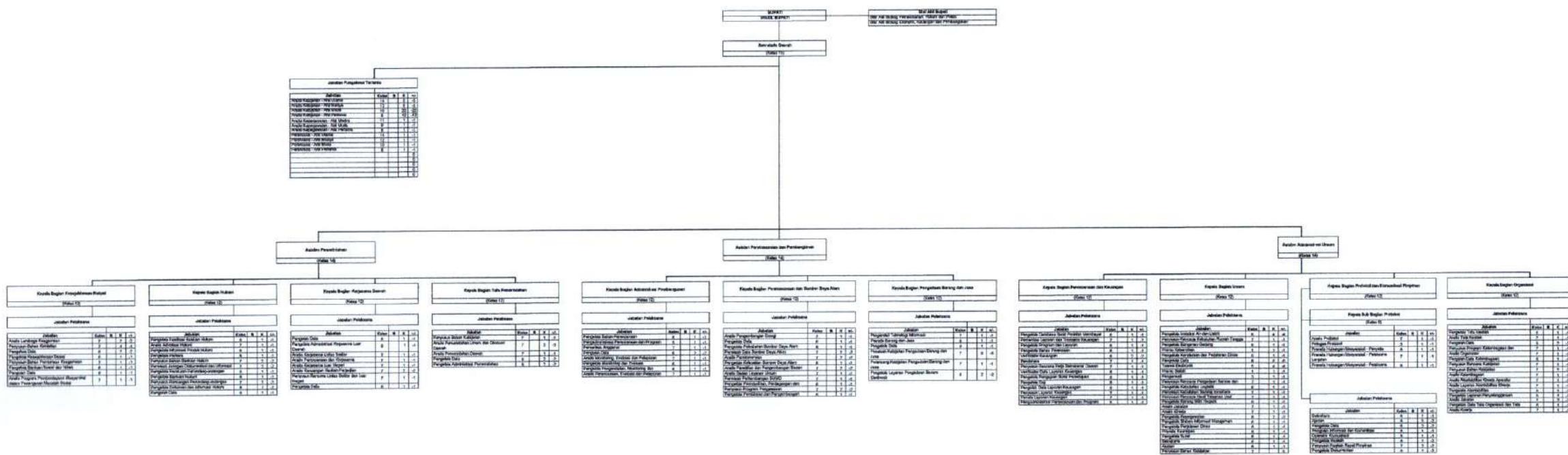
KEPALA BPD PENGELLAJA PERTAMBANGAN, TBT ALJAYA				
Kode B				
Kelebihan Sub Bagian TU (PTC) Pengelolaan Perikanan dan Tumbuhan				
Kode B				
Jumlah JPU	Kode B	B	K	N
Pengelolaan Cada		0	0	1
Pelaku Ekspor		0	1	0
Pengelolaan Konses		2	1	0
Pengelolaan Konses		2	1	0
Jumlah JPU				
Pengelolaan Pertambangan		0	0	2
Pengelolaan Pertambangan		0	0	1
Pengelolaan Pertambangan		0	0	1
Pengelolaan Pertambangan		7	0	1
Pengelolaan Pertambangan		8	0	1
Pengelolaan Pertambangan		8	0	1
Pengelolaan Pertambangan		8	0	1
Jumlah JPU				
Pengelolaan Pertambangan		0	0	12

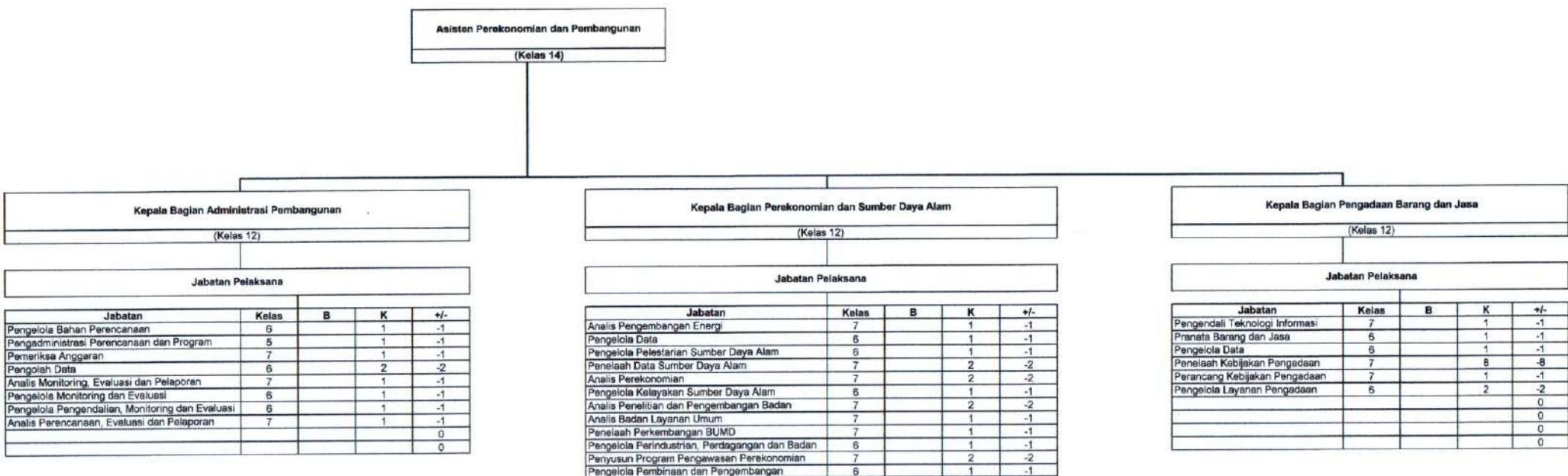
KAPAL UNTUK PENGELUARAN DAN PEMERINTAHAN				
Rencana				
Keadaan pada Bagian WU-UFC Pengeluaran Perolehan Kac. 10000000				
Rabu 01 Februari 2012				
Jumlah (Rupiah)				Katag. K = 40
Pengeluaran Debet				8 0 0 1 1
Pengeluaran Aset				3 0 0 1 0
Perubahan Kebutuhan				2 1 1 1 0
Jumlah (Rupiah)				Katag. K = 40
Perolehan Perolehan Pendek				5 0 0 1 -1
Perolehan Perolehan Pendek				6 0 0 1 -1
Perolehan Perolehan Pendek				7 0 0 1 -1
Perolehan Perolehan Pendek				8 0 0 1 -1
Perolehan Perolehan Pendek				9 2 0 7 -6

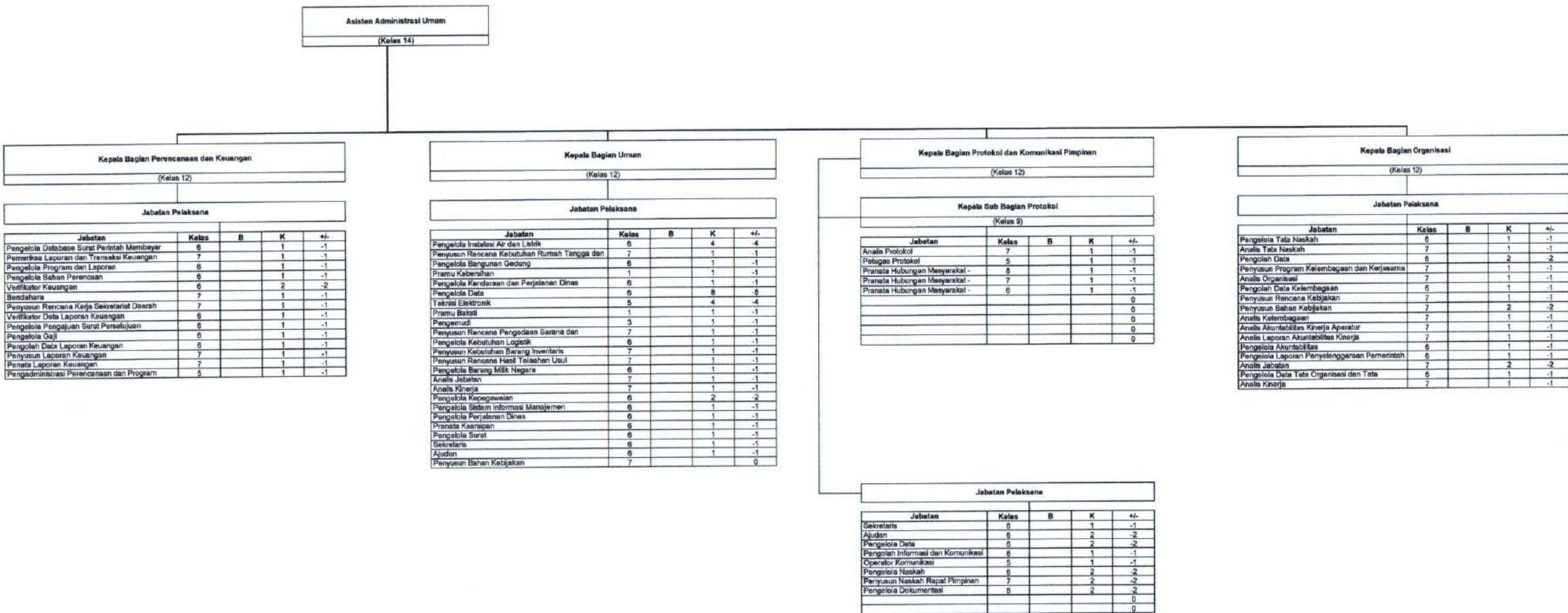
**PETA JABATAN
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KARAWANG**



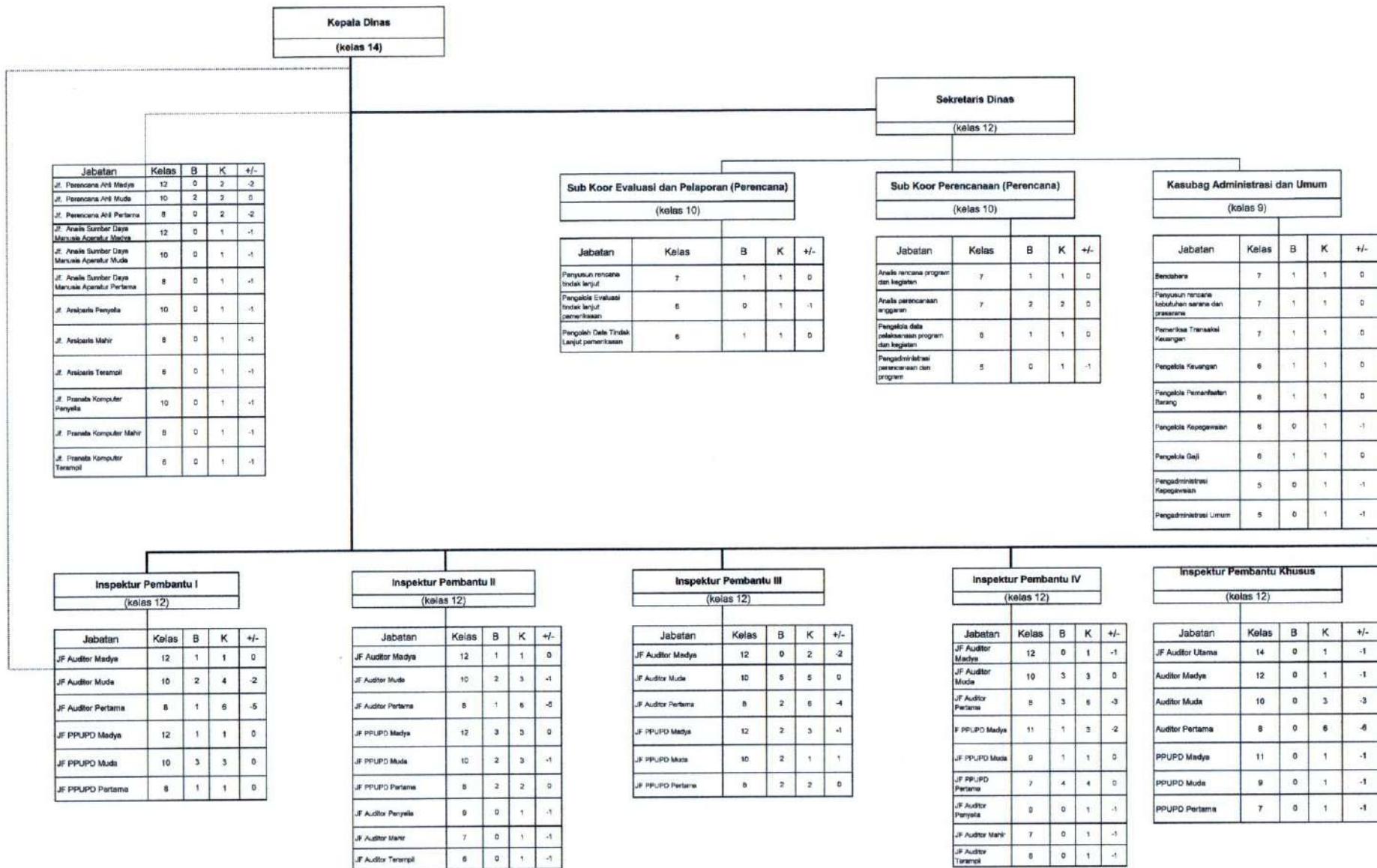
PETA JABATAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG



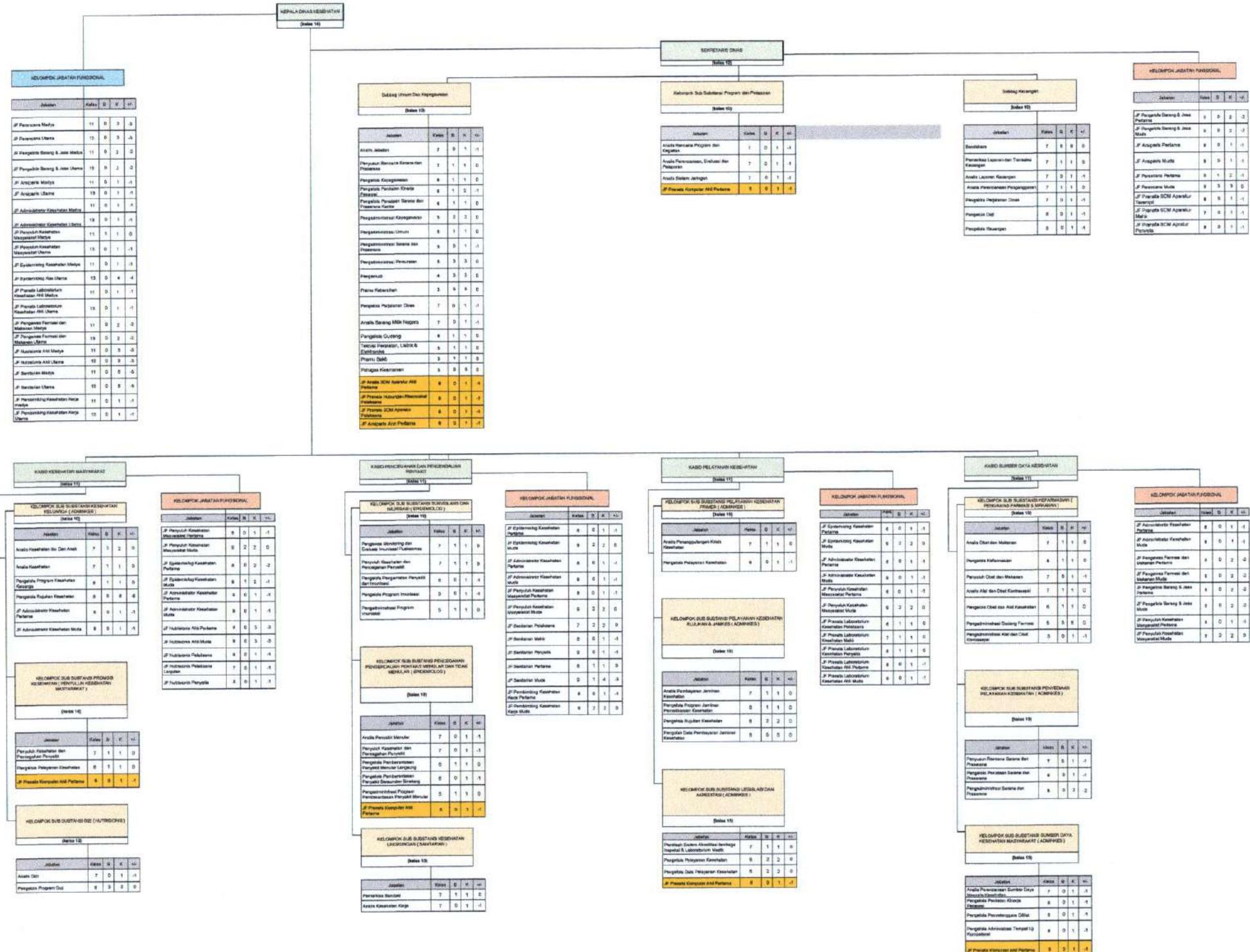




PETA JABATAN
INSPEKTORAT KARAWANG



**PETA JABATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG**



PETA JABATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KARAWANG

KEKUATAN PEGAWAI			
IV/e : -	III/d : 5	II/d : 3	I/d : -
IV/d : -	III/c : 3	II/c : 2	I/c : -
IV/e : -	III/b : 7	II/b : 3	I/b : -
IV/b : 1	III/a : 3	II/a : -	I/a : -
IV/a : 8			

34 ORANG TERDIRI DARI :

Es.I : -	Es.III : 5	JFT : -
Es.II : -	Es.IV : 12	JFU : 17

JAFUNG	
Pranata Komputer Pelaksana / Terampil	
Pranata Komputer Pelaksana Lajutan/ Mahir	
Pranata Komputer Penvela	
Pranata Komputer Ahli Pertama	
Perencana Ahli Pertama	
Perencana Ahli Muda	
Perencana Ahli Madya	
Pengerak Swadaya Masyarakat Pelaksana / Terampil	
Pengerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Lajutan/ Mahir	
Pengerak Swadaya Masyarakat Penvela	
Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	
Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



*Kasubbag Umum dan Kepegawaian
(III/c - S2)*

Jabatan	B	K
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1	
Pengadministrasi Umum	1	
Pengelola Surat	1	
Pengelola Kepegawaian	1	
Pengadministrasi Persuratan	1	
Pramu Kebersihan	2	
Pramu Bakti	1	
Pengomudi	1	
Petugas Keamanan	1	
Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	1	

*Kasubbag Keuangan
(III/d - S2)*

Jabatan	B	K
Bendahara	1	
Penata Keuangan	1	
Pengelola Gaji	1	
Penata Laporan Keuangan	1	
Pengadministrasi Keuangan		1

*Kasubbag Program dan Pelaporan
(III/c - S1)*

Jabatan	B	K
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan		1
Pengelola Program dan Kegiatan		1

*Kepala Bidang Pemerintahan Desa
(IV/a - S1)*

*Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa
(III/c - S1)*

Jabatan	B	K
Analis Institusi Masyarakat		1
Pedesaan		
Pengelola Administrasi Pemerintahan		1

Kepala Bidang Pengembangan Desa

*Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan TTG
(IV/a - S2)*

Jabatan	B	K
Penelaah Data SDA	1	
Pengelola Sarana Iptek	1	
Analis Pemanfaatan Teknologi		1

*Kepala Bidang Kelembagaan Desa
(IV/a - S1)*

Kepala Seksi Pemberdayaan Klb Masy. Desa

Jabatan	B	K
Pengolah data Kelembagaan	1	
Analis Kelembagaan Masy Desa	1	
Pengadministrasi pelatihan	1	

*Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masy. Desa
(IV/a - S2)*

*Kepala Seksi Pemberdayaan PUEMD
(IV/a - S2)*

Jabatan	B	K
Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha		1
Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan		1
Pengelola Pengembangan dan pembinaan Usaha		1
Pengadministrasi Umum		1

*Kepala Seksi Bina Perangkat Desa
(IV/a - S2)*

*Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
(IV/a - S2)*

*Kasi Peningkatan Partisipasi Masy. Desa
(III/d - S2)*

*Kepala Seksi Pemberdayaan LPMD
(III/d - S2)*

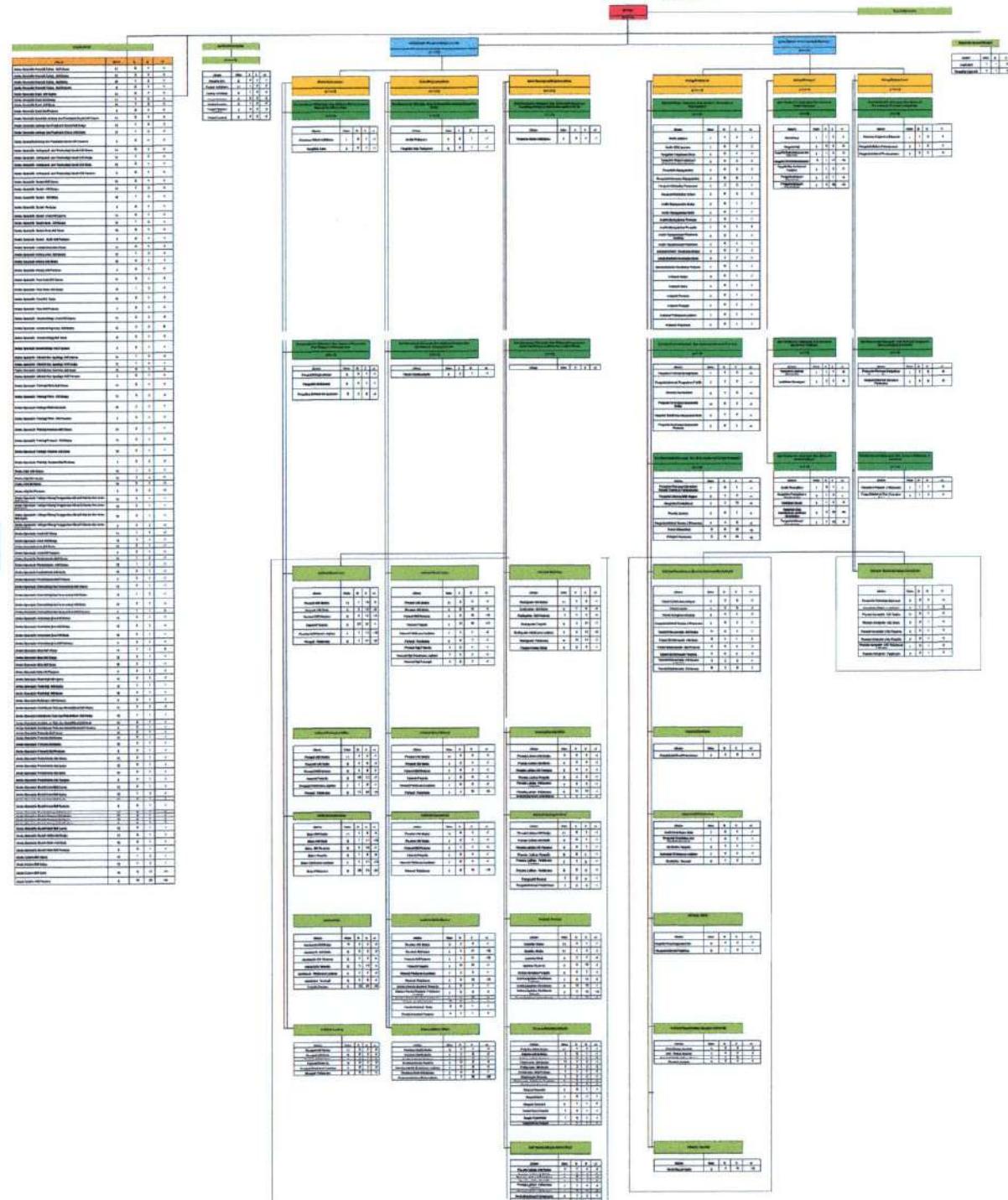
Jabatan	B	K
Analis Desa dan Kelurahan	1	
Penyusun Institusi Masy Pedesaan		1

Jabatan	B	K
Pengembang Sarana dan Prasarana	1	
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	
Analis Prasarana Kota & Pedesaan		1

Jabatan	B	K
Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masy		1
Pengelola Data Pemberdayaan Masy dan kelembagaan		1
Pengelola Data Hubungan masy dan Rumah Tangga		1
Pengadministrasi Umum	1	

Jabatan	B	K
Penyusun Pembinaan Institusi masy Pedesaan	1	
Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1
Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan		1
Pengadministrasi Umum	1	

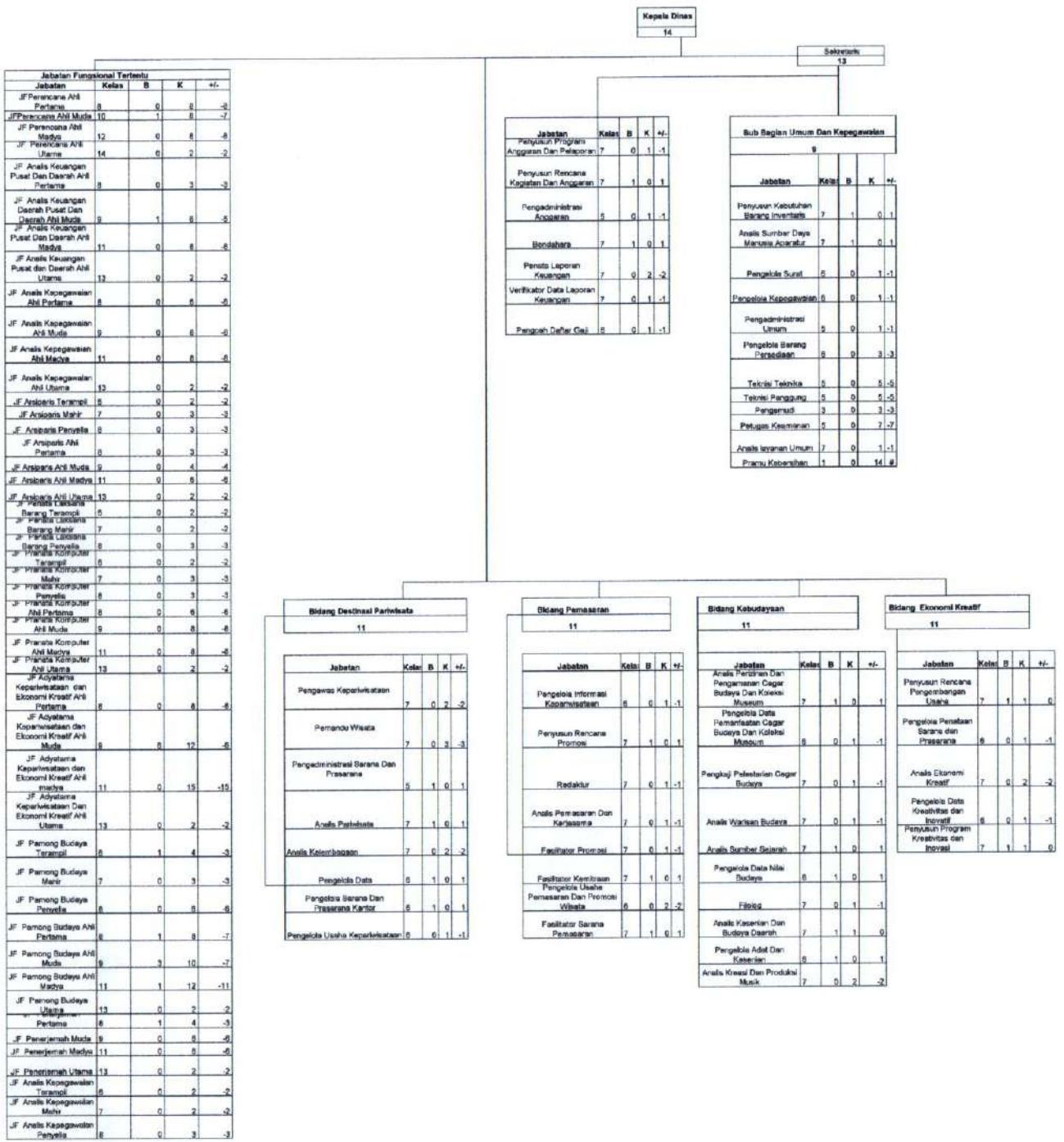
PETA JABATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARAWANG



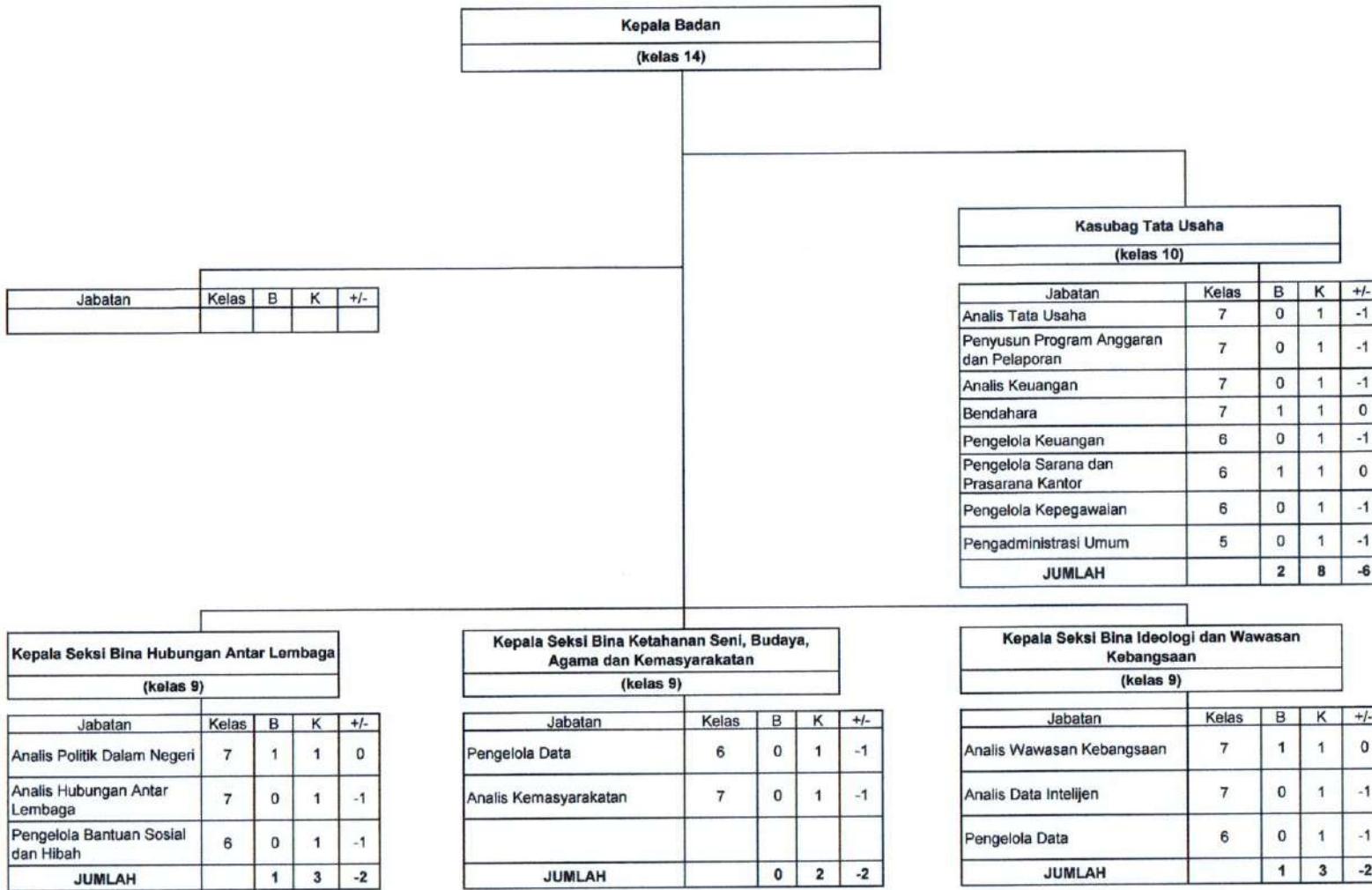
**PETA JABATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARAWANG**



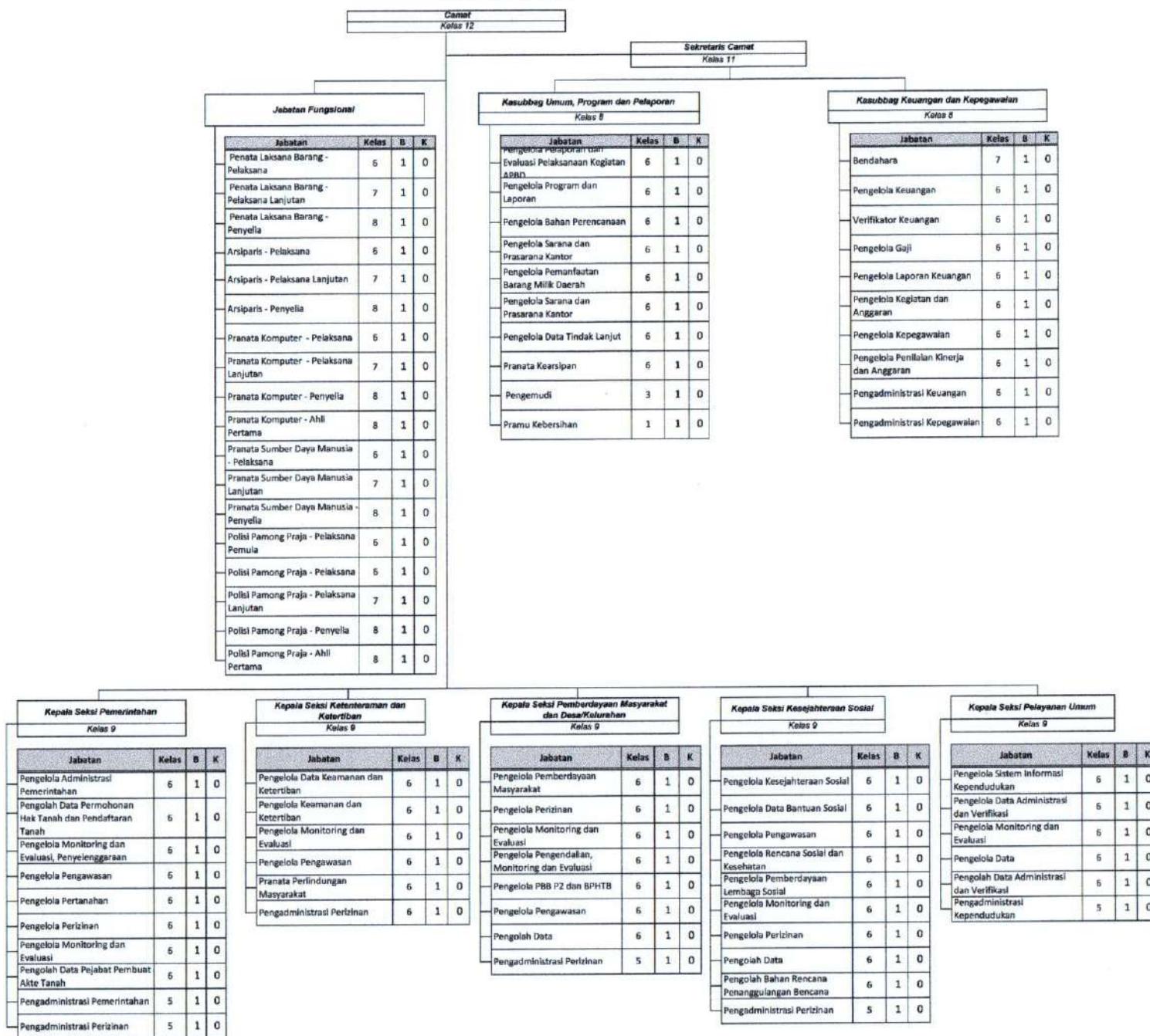
PETA JABATAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARAWANG



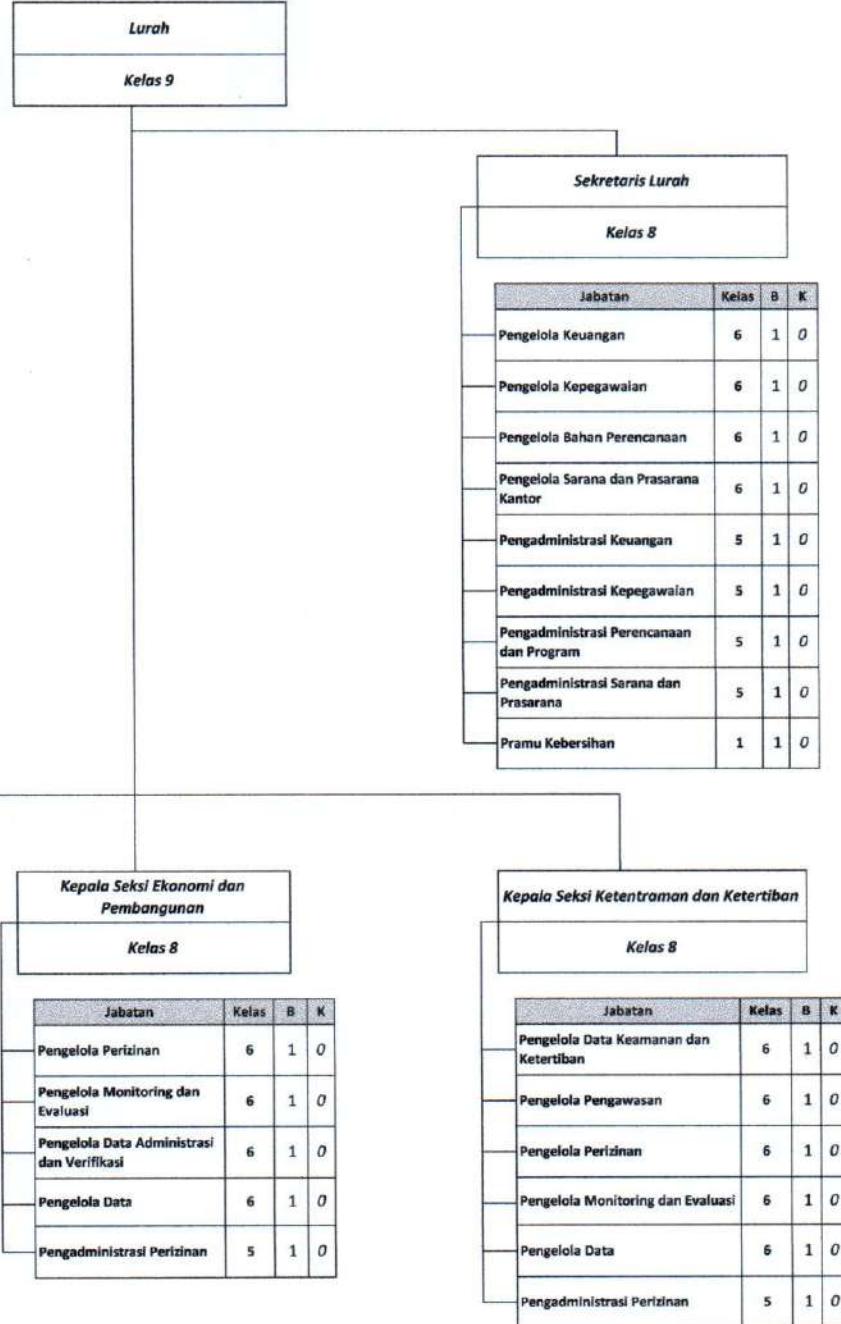
PETA JABATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARAWANG



PETA JABATAN
KECAMATAN TIPE A
KABUPATEN KARAWANG



PETA JABATAN
KELURAHAN KABUPATEN KARAWANG
KABUPATEN KARAWANG



**PETA JABATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**

